



**KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MELIBATKAN HALLIBURTON DAN
BLACKWATER SECURITY CONSULTING PADA PROSES
REKONSTRUKSI IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK
*THE USA DECISION IN INVOLVING HALLIBURTON AND BLACKWATER
SECURITY CONSULTING IN IRAQ RECONSTRUCTION PROCESS AFTER
USA INVASION***

SKRIPSI

**Oleh :
YULININGRUM
040910101051**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2009



**KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MELIBATKAN HALLIBURTON DAN
BLACKWATER SECURITY CONSULTING PADA PROSES
REKONSTRUKSI IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK
*THE USA DECISION IN INVOLVING HALLIBURTON AND BLACKWATER
SECURITY CONSULTING IN IRAQ RECONSTRUCTION PROCESS AFTER
USA INVASION***

SKRIPSI

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial**

Oleh :

YULININGRUM

040910101051

Dosen Pembimbing I

Dr. Puji Wahono, M.Si

132 133 403

Dosen Pembimbing II

Heri Alfian, S.Sos., M.Si

132 309 808

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2009

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :
Allah SWT yang telah memberi hidup dan kehidupan untukku.

Ibuku tercinta, Ibuku yang terhebat yang selalu menjagaku sekuat tenaganya Ibu Janem Matur sembahnuwun engkang katah. Terima kasih untuk doa, cinta dan limpahan kasih sayang serta kesabaran ketabahan dalam merawatku dari kecil yang nakal hingga kini dewasa yang sering sakit-sakitan. Maafkan saya yang sering membuat Ibu menangis. Doa dan cintamu senantiasa aku butuhkan untuk menjalani hidupku yang akan datang, semoga kita selalu menjadi manusia yang senantiasa dimuliakan Allah. Harapanku, semoga aku selalu bisa membuat Ibu bahagia menjalani hidup ini...Amin.

Bapakku yang hebat Bapak Suwito, yang tekun dan pekerja keras untuk membuat aku menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih Bapak yang selalu mewujudkan semua keinginanku dengan berbagai cara, terima kasih selalu menjagaku dengan sabar dan terimakasih atas kebebasan yang telah bapak berikan kepadaku dalam menjalani hidup.

Tatik Hariyati, SE.....Terima kasih kakak sudah menjadi kakak terhebat di dunia ini. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bisa menjadi adikmu. Terima kasih atas kasih sayangnya serta dukungan moril dan spirituil yang kakak berikan. Maaf, aku tidak bisa menjadi sempurna seperti harapan kakak selama ini. Terimakasih untuk M. Maskur, SE atas limpahan kasih sayang dan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah aku dapatkan dari seorang "Mas". Terima kasih untuk cahaya kebahagiaan baru untuk rumah kita, Kanaya Nawwafa Maskur.

Karya ini tidak dipersembahkan untuk mereka yang menegakkan demokrasi dengan senjata dan kebohongan.

Semua Guru di SDN Tambibendo I, SMPN I MOJO dan SMAN 4 Kediri
Almamaterku,
Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

MOTTO

“...ranting muda akan lurus jika kau luruskan; sementara kayu tua tak mungkin lagi kau bengkokkan”¹

Pikirkan sesuatu yang baik, dekatkan diri pada kebaikan dan tunggulah hal baik akan datang padamu
(Penulis)

¹Muhammad Syarif ash-Shawwaf, *ABG islami*, (Pustaka Hidayah, Bandung, 2003) hal. 19

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULININGRUM

NIM : 040910101051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah ini yang berjudul **“KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MELIBATKAN HALLIBURTON DAN BLACKWATER SECURITY CONSULTING PADA PROSES REKONSTRUKSI IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK”** ini benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Karya tulis ini juga bukan merupakan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juli 2009

Yuliningrum

NIM. 040910101051

PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MELIBATKAN HALLIBURTON DAN
BLACKWATER SECURITY CONSULTING PADA PROSES
REKONSTRUKSI IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK**

Oleh

Yuliningrum

NIM 040910101051

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Puji Wahono, M.Si

Dosen pembimbing Pendamping : Heri Alfian, S.Sos.,M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan tim penguji skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada
Hari dan Tanggal : Jumat, 03 Juli 2009
Jam : 09.30 WIB

Panitia Penguji :

Ketua : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum. (.....)
NIP. 131 658 013

Sekretaris I : Dr. Puji Wahono, M.Si (.....)
NIP. 131 658 390

Sekretaris II : Heri Alfian, S.Sos , M.Si (.....)
NIP. 132 309 808

Anggota I : Drs. Supriyadi, M.Si (.....)
NIP. 131 474 383

Anggota II : Fuat Al Bayumi, SIP (.....)
NIP. 132 310 231

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP.130 935 420

The USA Decision in Involving Halliburton and Blackwater Security Consulting in Iraq Reconstruction Process after USA Invasion

Yuliningrum

International Relations, Social and Political Science Faculty, Jember University

ABSTRACT

This research aimed to relate the correlation between the existence of Halliburton and Blackwater Security Consulting in Iraq and reconstruction of Iraq after USA invasion to the interest of USA. The problem of this research was analyzed by a research design that combined state as unit of analysis and PMC as unit of explanation, and used national interest as a theory. A hypothesis of this research is about the causal relation between the existence of Halliburton and Blackwater Security Consulting in Iraq and reconstruction of Iraq done by USA

By secondary data analysis, it was founded that USA decision of involving Halliburton and Blackwater in reconstruction process of Iraq after USA invasion was made because of politic and economic interest of USA. Politic interest was related to reputation of USA in the international view. Domestic critics can be avoided by machinery settlement. USA did not want that all countries would consider USA as a bad actor by providing its national military in Iraq. The economic interest was related to USA effort in maintaining its oil assets in Iraq, this policy had a minimum risk and fund. The profit for the government is getting the compensation from private sector that managed this business. The phenomenon happening in Iraq showed that USA gave a big chance to the growing up of machinery business activity.

Keyword: involvement, Halliburton and Blackwater, Iraq reconstruction

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan pada Allah SWT, atas segala anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul “KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MELIBATKAN HALLIBURTON DAN BLACKWATER SECURITY CONSULTING PADA PROSES REKONSTRUKSI IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK”, dengan baik.

Setelah Perang Dingin, dunia ternyata tidak lebih aman dan tentram. Konflik dan ketegangan masih terjadi di mana-mana. Yang memprihatinkan, dunia semakin dikuasai oleh para tentara bayaran. Keberadaan tentara bayaran dan Private Military Company (PMC) semakin banyak bermunculan, salah satu alasannya adalah adanya *income* yang menggiurkan. Sekali terlibat dalam suatu proyek para tentara bayaran dan PMC ini bisa menghasilkan puluhan juta dolar Amerika Serikat. Di Irak, Halliburton sebuah PMC asal Amerika Serikat mampu memperoleh sampai delapan milyar dollar untuk menangani proyek perbaikan di Irak.

Banyaknya konflik dan perang yang melibatkan banyak korban, baik dari militer maupun sipil, maka untuk mengurangi korban dari militer lokal negara yang ikut perang atau *active duty* yang gugur dalam perang, dibutuhkan seseorang yang mempunyai kemampuan militer dan yang bersedia berperang, di luar prajurit atau tentara nasional. Mereka yang menggantikan atau membantu peran prajurit dalam perang inilah yang dinamakan tentara bayaran atau *mercenaries*. *Mercenaries* atau tentara bayaran juga populer dengan sebutan *soldier of fortune* yang artinya tentara yang bertempur dan menyerang dalam sebuah pertempuran demi uang, dan tidak terpengaruh terhadap ideologi, kebangsaan atau paham politik.

Penulisan skripsi ini tidak akan lebih baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak . Penulis hanya bisa memberikan rasa terima kasih yang tulus atas keberadaan mereka dalam proses penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Puji Wahono, penulis memberikan penghargaan dan rasa terima kasih atas diskusi-diskusi tentang penulisan

skripsi serta kesediaan bapak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik atas tulisan ini. Penulis juga memberikan penghargaan dan rasa terimakasih kepada Bapak Heri Alfian atas dorongannya kepada penulis untuk memahami bagaimana cara menulis yang benar dan terus melanjutkan skripsi ini hingga menjadi karya yang dapat menambah wawasan penulis dan mahasiswa hubungan internasional lainnya, serta diskusi-diskusi yang memunculkan pemahaman baru dalam setiap penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Jember atas beberapa kemudahan administrasi yang penulis dapat selama menjadi mahasiswa FISIP. Begitu juga kepada seluruh karyawan FISIP, penulis mengucapkan terima kasih. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Drs. Supriyadi, M.Si., dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan internasional Drs. Djoko Susilo, M.Si, penulis juga mengucapkan terimakasih atas setiap bantuan kepada penulis selama menjalankan peran penulis sebagai mahasiswa.

Karya tulis ini merupakan bagian terpenting dari perjalanan hidup penulis. Oleh karena itu, kepada kedua orang tua, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran mereka menunggu kelulusan penulis. Atas setiap dukungan moral dan moril dari mereka, penulis memberikan rasa hormat dan saying kepada mereka. kepada Mbak Tatik, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi teladan paling baik bagi penulis.

Menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Jember adalah upaya penulis menjadi insan yang lebih baik. Karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPM dan seluruh ORMAWA FISIP UNEJ periode 2006-2007 yang memberikan proses pembelajaran bagi penulis. Kepada seluruh “*Genk Lebay ‘04*” Desi, Syifa, Anggit, Aslahudin (jhon), Arip, Afif, Cholil, Halimi, Saiful, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam proses pembelajaran yang begitu mahal harganya. Baik di “*Rumah*”, warung *cor* , Kedai

Soe-Soe dan di seluruh lesehan yang ada di Jember kebersamaan kita akan menjadi kisah klasik yang sangat berharga untuk masa depan.

Untuk warga kos Bangka IV/24 Jember, Ratna, Mita, Riska, terima kasih atas diskusi dan curhat tengah malamnya. Kepada Hanim dan Dwi terima kasih suplay makanannya, Nila, Lina, Agus, dan Mbak Vicky, terimakasih atas persaudaraan yang kalian suguhkan, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi sumber kebahagiaan bagi penulis walau kebersamaan kita hanya satu tahun. Kepada konco-konco IMAKA telah menghadirkan suasana Kediri di Jember.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bambang Wahyudi S. Sos (JuBe') atas bantuan, bimbingan dan kesabaran yang di berikan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa HI. Kepada Widyasti Kwardani (Nene), Lutfi, Berlin, Faiza, Reni dan teman-teman HI angkatan 2004 lainnya, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.

Skripsi ini sangat terbuka dengan proses perbaikan. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan isi di dalamnya akan menjadi lebih mudah dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Pada akhirnya, penulis berharap agar segala yang tertuang di dalam skripsi ini mampu melintaskan pemahaman baru bagi para pestudi Ilmu Hubungan Internasional.

Jember, 29 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i i
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
PEMBIMBINGAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	6
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Permasalahan	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Dasar Pemikiran	7
1.5.1 Penelitian Sebelumnya	12
1.6 Argumen Utama	12
1.7 Metode Penelitian	13

1.7.1 Metode Pengumpulan Data	13
1.7.2 Metode Analisis Data	14
1.8 Sistematika Penulisan	14

BAB II. GAMBARAN UMUM HALLIBURTON DAN BLACKWATER

SECURITY CONSULTING SEBAGAI PRIVATE MILITARY

COMPANY.....	16
2.1 Kemunculan PMC dalam Hubungan Internasional	16
2.2 PMC Pasca Perang Dingin	25
2.3 Signifikansi Keberadaan PMC di Wilayah Konflik	31
2.4 Mercenary dan Hukum Perang	35
2.5 Halliburton dan Blackwater Security Consulting (BSC)	39
2.5.1 Halliburton	40
2.5.2 Blackwater Security Consulting (BSC)	44

BAB III. KETERLIBATAN HALLIBURTON DAN BLACKWATER

SECURITY CONSULTING DI IRAK PASCA INVASI AMERIKA

SERIKAT	50
3.1 Invasi Amerika Serikat ke Irak	50
3.2 Irak Pasca Invasi Amerika Serikat	58
3.2.1 Kondisi Sosial Irak Pasca Invasi	61
3.2.2 Kondisi Politik Irak Pasca Invasi	63
3.2.3 Kerusakan Infrastruktur Irak Pasca Invasi	65
3.3 Keberadaan Halliburton Blackwater Security Consulting di Irak	71
3.3.1 Masuknya Halliburton dan Blackwater Security Consul- ting ke Irak	71
3.3.2 Halliburton	71
3.3.3 Blackwater Security Consulting	74

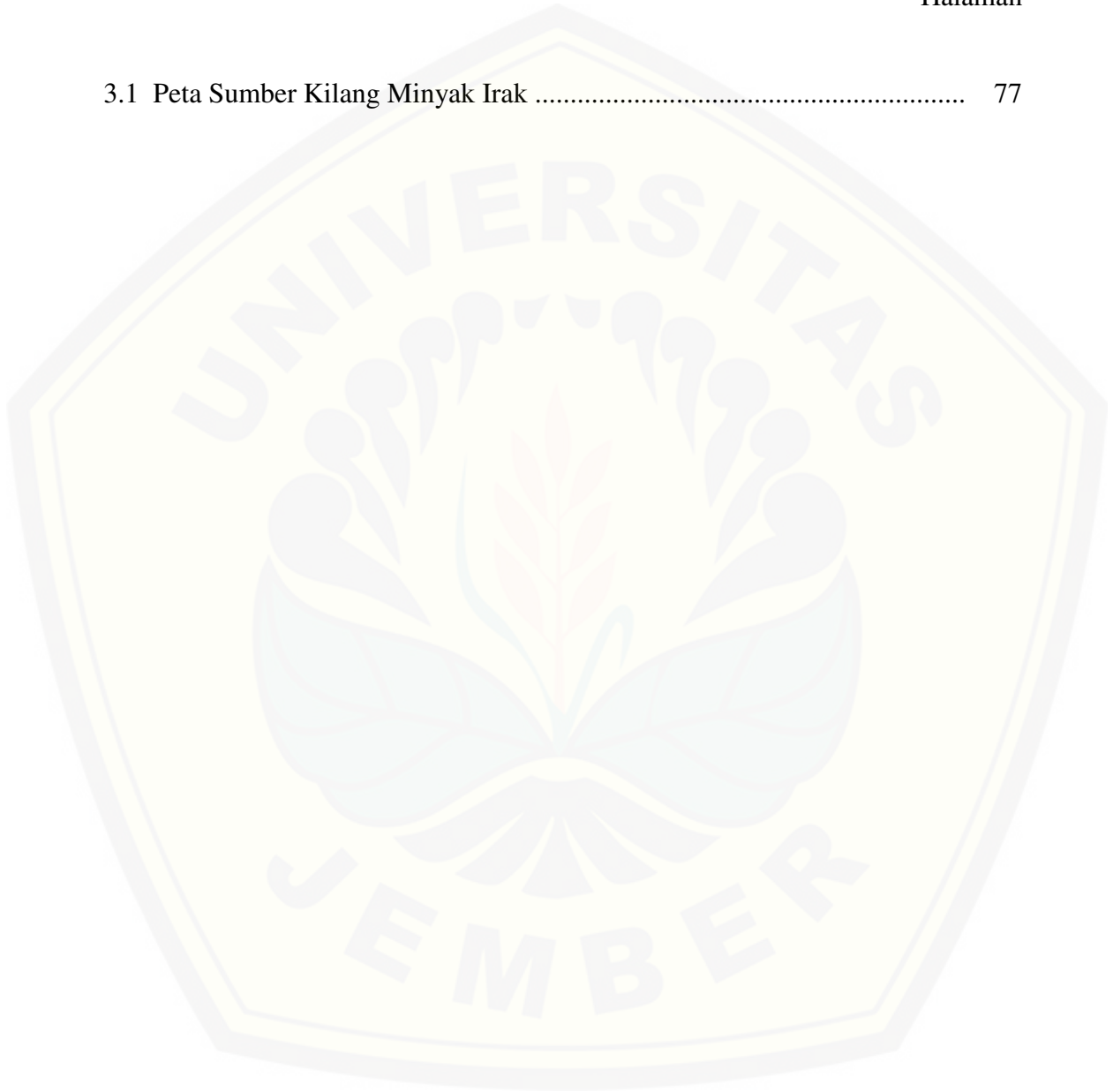
BAB IV. KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MELIBATKAN HALLIBURTON DAN BLACKWATER SECURITY CONSULTING PADA PROSES REKONSTRUKSI IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK	78
4.1 Keputusan Amerikan Serikat Melibatkan Halliburton dan Blackwater Security Consulting	78
4.1.1 Kepentingan Politik	82
4.1.2 Kepentingan Ekonomi	86
4.2 Signifikansi Keberadaan Halliburton dan Blackwater Security Consulting di Irak	92
4.2.1 Halliburton	94
4.2.2 Blackwater Security Consulting	97
4.3 Alasan Terpilihnya Halliburton dan Blackwater Security Consulting	101
4.3.1 Halliburton	102
4.3.2 Blackwater Security Consulting	105
BAB V. KESIMPULAN	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Daftar Private Military Company Internasional	27
2.2 Negara Tempat beroperasinya PMC	33
2.3 Profil Halliburton	43
2.4 Profil Blackwater Security Consulting	48
3.1 Invasi Amerika Serikat ke Irak	57
3.2 Korban Invasi Amerika Serikat ke Irak	60
3.3 Infrastruktur Irak yang akan direkonstruksi Pasca Invasi	69
4.1 Kontrak Halliburton dan Pemerintah Amerika Serikat	96
4.2 Kontrak Halliburton dalam Program Rekonstruksi Infrastruktur minyak Irak secara Kumulatif	97

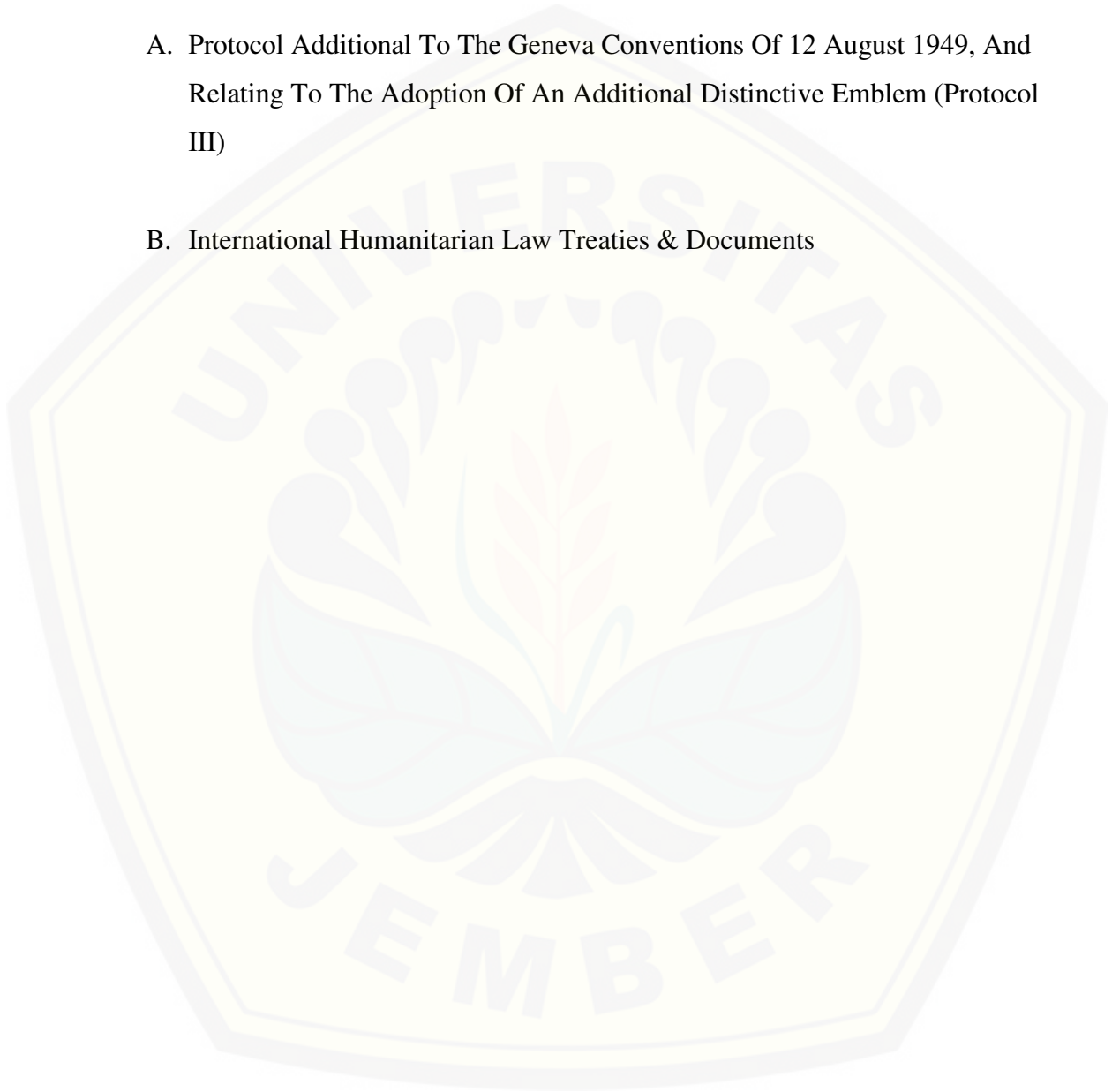
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Peta Sumber Kilang Minyak Irak	77



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Adoption Of An Additional Distinctive Emblem (Protocol III)
- B. International Humanitarian Law Treaties & Documents



DAFTAR SINGKATAN



AI	: Amnesty Internasional
ANC	: African National Congress
APGC	: Protocol Additional Geneva Conventions
AVG	: American Volunteer Group
BSC	: Blackwater Security Consulting
CPA	: Coalition Provisional Authority
EO	: Executive Outcomes
IAEA	: International Atomic Energy Association
INC	: Iraqi National Congress
KRBK	: Kantor Rekonstruksi dan Bantuan Kemanusiaan
NEPDG	: National Energy Policy Development Group
ORHA	: The Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance
PKSI	: Pemerintahan Koalisi Sementara Irak
PMC	: Private Military Company
LOGCAP	: Logistic Civil Augmentation Program
RMAP	: Remotely Piloted Airship Vehicle
SADF	: South African Defence Force
SAS	: Special Air Services
SSG	: Security Sector Governance
USAID	: United States Agency for International Development
UNDP	: United Nations Development

BAB I
PENDAHULUAN

*“welcome to the soldier side
where there is no one here but me
people are grow up to die
There in no one here but me”*

-“Soldier Side” System of A Down-

1.1 Latar Belakang

Konflik antar negara sejak dahulu dan seterusnya akan selalu ada. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antar negara. Contoh konflik yang terjadi dalam dasawarsa terakhir ini adalah konflik Irak-Amerika Serikat yang masih dalam pro dan kontra. Pro dan kontra ini disebabkan karena sikap arogan Amerika Serikat yang secara membabi-butu menyerang Irak dengan alasan yang ternyata tidak terbukti yaitu tuduhan Amerika Serikat kepada Irak tentang kepemilikan senjata pemusnah massal yang dikembangkan oleh Saddam Hussain. Pro kontra lainnya adalah ketika DK PBB tidak mampu melakukan dan bertindak apa-apa ketika invasi Amerika Serikat dilancarkan di Irak pada tahun 2003 lalu.

Setelah Perang Dingin, dunia ternyata tidak lebih aman dan tentram. Konflik dan ketegangan masih terjadi di mana-mana. Yang memprihatinkan, dunia semakin dikuasai oleh para tentara bayaran. Keberadaan tentara bayaran dan *Private Military Company* (PMC) semakin banyak bermunculan, salah satu alasannya adalah adanya income yang menggiurkan. Sekali terlibat dalam suatu proyek para tentara bayaran dan PMC ini bisa menghasilkan puluhan juta dollar Amerika Serikat. Di Irak, Halliburton sebuah PMC asal Amerika Serikat mampu memperoleh sampai delapan milyar dollar untuk menangani proyek perbaikan di Irak.

Pekerjaan para tentara bayaran dan PMC penuh dengan resiko tinggi. Dengan spesialisasi jasa pengamanan, pengawalan, dan pelayanan teknis di wilayah-wilayah konflik, dan keseharian mereka selalu dibayang-bayangi maut. Di Irak saja

diperkirakan 600 personil tewas diserang kelompok separatis. Akan tetapi, kekejaman separatis dan suasana wilayah konflik bukanlah hal menakutkan bagi para tentara bayaran. Hal itu dikarenakan para tentara bayaran adalah mantan tentara yang bernyali dan mempunyai keberadaan berperang sangat besar. Keberadaan tentara bayaran sebenarnya sudah tercatat sejak berabad-abad lalu. Akan tetapi format yang modern baru muncul sejak mantan Special Air Service (SAS), David Stirling memperkenalkan.

Banyaknya konflik dan perang yang melibatkan banyak korban, baik dari militer maupun sipil, maka untuk mengurangi korban dari militer lokal negara yang ikut perang atau *active duty* yang gugur dalam perang, dibutuhkan seseorang yang mempunyai kemampuan militer dan yang bersedia berperang, di luar prajurit atau tentara nasional. Mereka yang menggantikan atau membantu peran prajurit dalam perang inilah yang dinamakan tentara bayaran atau *mercenaries*. *Mercenaries* atau tentara bayaran juga populer dengan sebutan *soldier of fortune* yang artinya tentara yang bertempur dan menyerang dalam sebuah pertempuran demi uang, dan tidak terpengaruh terhadap ideologi, kebangsaan atau paham politik.²

Tentara bayaran tergabung dan terorganisasi di bawah *Private Military Company* (PMC). PMC adalah perusahaan atau korporasi yang menyediakan jasa dan keahlian yang berhubungan dengan bidang militer atau bidang sejenisnya. Perusahaan seperti ini juga dikenal sebagai korporasi militer swasta, firma militer swasta, penyedia jasa militer, dan secara luas sebagai industri militer swasta. Jasa-jasa yang ditawarkan PMC antara lain adalah jasa logistik, pelatihan militer, pertahanan, serta jasa keamanan. Jasa PMC umumnya digunakan sebagai pendukung bagi operasi resmi suatu angkatan bersenjata, namun sering juga digunakan untuk pribadi, misalnya sebagai bodyguard. PMC merupakan lembaga sipil yang diberi wewenang

² swaramuslim.net/galery/mercenary/index.php?page=C - 16k (diakses pada 1 Juli 2008)

kerja sama dengan unit-unit militer di dalam negerinya atau bahkan negara lain yang disetujui oleh departemen pertahanan.

Tentara bayaran sering disewa negara yang berperang untuk membantu melaksanakan rencananya. Menggunakan tenaga PMC akan banyak memudahkan operasi karena dalam kerja mereka, penyewa tidak akan menanggung logistik para tentara bayaran ini. Selain itu peralatan tempur pun juga sudah mereka sediakan sendiri. Tentara bayaran juga mempunyai keahlian tempur yang sama dengan tentara nasional. Ada kalanya jasa tentara bayaran itu juga diminta oleh pemerintah setempat untuk melawan pemberontak. Diakui atau tidak bisnis tentara bayaran (*mercenary*) modern semakin berkembang pesat paska Perang Dingin. Kedua blok yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut pengaruh ideologi, minyak, obat bius dan intan. Agar tidak terlalu mencolok negara-negara besar itu menggunakan merceneries.

Tentara bayaran banyak berkembang di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan banyak lagi PMC-PMC besar yang berada di kawasan Afrika dan Timur Tengah yang merupakan daerah pusat konflik. Salah satu PMC modern yang terbesar adalah Halliburton, yang berada di Amerika Serikat. Perusahaan ini yang awalnya bergerak di bidang minyak sejak 1919 mulai bersentuhan dengan dunia militer saat perang Vietnam untuk menangani infrastuktur senilai US\$10 juta. Akan tetapi bisnis Halliburton baru besar setelah Dick Cheney masuk pada tahun 1995. Proyek awal Halliburton adalah dari Brown & Root Services senilai US\$8,5 juta untuk pengkajian penerapan PMC di Perang Teluk I. Halliburton semakin besar ketika Presiden G.W. Bush masuk melalui Dresser Industries tahun 1998. Tahun 2006 perusahaan dengan karyawan berjumlah 106.000 orang itu memiliki pemasukan US\$13 miliar dan pendapatan bersih 2,35 miliar.³

Untuk mendukung upaya Amerika Serikat menguasai Irak maka Presiden Amerika Serikat George Walker Bush menunjuk PMC Halliburton sebagai pihak yang dianggap layak untuk menyiapkan program dukungan bagi keberadaan militer

³ http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/tentara_bayaran-redirected (diakses pada 10 Mei 2008)

Amerika Serikat di Irak.⁴ Menurut data resmi yang disampaikan *Jane's Defense International Review*, Halliburton hanya satu dari beberapa PMC yang disewa pemerintahan Bush di Irak. Selain Halliburton terdapat Blackwater Security Consulting, Vinnel, Dyncorp, dan sebagainya. Halliburton mendapat kepercayaan besar dari pemerintahan Amerika Serikat karena kemampuannya. Halliburton menurunkan sekitar 24.000 personil ke Irak atau sekitar $\frac{3}{4}$ total pekerja asing yang ada di Irak.⁵

PMC lainnya yang juga ditunjuk pemerintah Bush untuk bekerja di Irak adalah Blackwater Security Consulting (BSC). Blackwater adalah PMC dunia yang paling modern. Dikatakan modern karena mutakhir di dalam kelengkapan dan sarananya. Blackwater merupakan satu-satunya PMC yang memiliki fasilitas paling lengkap, luas, modern, dan mutakhir. Bahkan tentara reguler Amerika Serikat sering berlatih di fasilitas yang dimiliki oleh Blackwater yang memiliki luas total 2.400 hektar are dan diperlengkapi dengan miniatur kota sebagai tempat berlatih perang kota⁶. Blackwater Security Consulting sangat dekat dengan Angkatan Darat Amerika Serikat karena pendiri dan karyawannya adalah mantan tentara nasional yang masih mempunyai keberanian tinggi dan kemampuan tentara profesional. Blackwater bukan PMC sembarangan, selain dari mantan tentara reguler Amerika Serikat, Blackwater juga banyak merekrut mantan personil pasukan elit dari banyak negara. Hingga tahun 2006, menurut data resmi yang dikeluarkan, Blackwater telah menghasilkan 50.000 personil dengan kualifikasi tentara profesional.⁷

Beberapa uraian di atas menjelaskan mengapa Pemerintah Amerika Serikat memilih kedua PMC tersebut untuk melancarkan proyek-proyek besar Amerika

⁴ Halliburton pada awalnya bukanlah PMC, melainkan perusahaan jasa pengolahan minyak dan gas bumi yang telah berdiri sejak 1919. Kiprahnya di bisnis kontraktor militer mencuat setelah AS melakukan invasi pertamanya ke Irak (*Desert Storm*) sekitar tahun 1992

⁵ "Tentara Bayaran AS dan Proyek di negara Muslim" dalam swaramuslim.net/gallery/mercenary/index.php?page=C - 16k. (diakses pada 6 Agustus 2008)

⁶ <http://www2.kompas.com/2007/10/bisnis-tentara-bayaran-angin-segar.html> (diakses pada 15 Agustus 2008)

⁷ blackwatersecurity.com/services.html. (diakses pada 18 Desember 2008)

Serikat di Irak. Akan tetapi di samping berbagai prestasi dan keunggulan yang dimiliki oleh Halliburton dan Blackwater juga tidak sedikit keburukan/kejahatan yang dilakukan oleh kedua PMC itu. Kasus serangan di Fallujah Irak akhir Maret 2004 yang menewaskan empat korban mencuatkan nama Blackwater di Irak. Selain kasus tersebut, dalam laporan yang dikeluarkan oleh Kongres tahun 2005 Blackwater bertanggung jawab atas 200 kasus penembakan termasuk pembunuhan pengawal Wakil Presiden Adel Abdul Mehdi di kawasan zona Hijau di Baghdad.⁸

⁸“Deplu AS Lindungi Kejahatan Blackwater di Irak” dalam www.erasuslim.com/berita/int/7a03162600-deplu-as-lindungi-kejahatan-blackwater-irak.htm. (diakses pada 6 Agustus 2008)

Perkembangan PMC yang terbilang fenomenal ternyata masih terus diperdebatkan. Ada yang tidak setuju terutama karena banyaknya kasus pelanggaran hukum seperti pelanggaran undang-undang atau regulasi di wilayah penugasan, kudeta, atau penumbangan pemerintah yang sah. Namun ada juga pihak yang berpendapat bahwa keberadaannya tak perlu dihambat karena potensi peran positifnya dalam sistem internasional seperti perannya sebagai tentara bayaran yang mampu bekerja dengan loyalitas dan kemampuan tinggi untuk membantu negara yang mereka dukung.

Melihat paparan di atas yang menjelaskan tentang tentara bayaran, dan beberapa fakta mengenai keterlibatan PMC Halliburton dan Blackwater Security Consulting tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang keputusan Amerika Serikat melibatkan kedua PMC tersebut dalam proses rekonstruksi Irak pasca serangan Amerika Serikat ke Irak pada Mei 2003. Pernyataan tersebut, membuat penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul:

KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MELIBATKAN HALLIBURTON DAN BLACKWATER SECURITY CONSULTING PADA PROSES REKONSTRUKSI IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Batasan Materi

Pembatasan materi dapat berfungsi untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau obyek yang akan dianalisa agar pembahasan tidak menyimpang dari jalur dan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Batasan materi mencakup kawasan atau obyek studinya. Berdasarkan batasan materinya, maka tulisan ini dibatasi pada perumusan kebijakan Pemerintah Amerika Serikat melibatkan Halliburton dan Blackwater Security Consulting pada proses rekonstruksi Irak pasca invasi Amerika Serikat ke Irak.

1.2.2 Batasan Waktu

Untuk memudahkan pembahasan dan menjaga agar pembahasan tidak melebar, maka diperlukan adanya batasan waktu. Pada penulisan ini batasan waktu yang ditetapkan penulis yaitu paska invasi Amerika Serikat ke Irak pada Mei 2003 sampai pada masa rekonstruksi Irak pasca invasi Amerika Serikat yaitu tahun 2007. Pembatasan waktu yang ditetapkan penulis tersebut tidak bersifat mutlak dan tertutup dalam penulisan ini. Artinya penulis tidak menutup kemungkinan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di luar kurun waktu tersebut untuk dipaparkan selama masih relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3 Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: Mengapa Amerika Serikat Melibatkan Halliburton dan Blackwater Security Consulting pada proses rekonstruksi Irak pasca invasi Amerika Serikat ke Irak?

1.4 Tujuan Penelitian

Segala aktivitas yang dilakukan oleh peneliti pasti memiliki tujuan tertentu, karena tujuan akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa kepentingan Amerika Serikat menggunakan Halliburton dan Blackwater Security Consulting dalam proses rekonstruksi Irak pasca invasi Amerika Serikat.

1.5 Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam penulisan karya ilmiah, kerangka pemikiran merupakan hal yang sangat krusial, karena disamping berguna untuk menjelaskan permasalahan dan

menghindari adanya bias, juga untuk menyusun hipotesa. Selain itu, kerangka dasar pemikiran bisa dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam proses pengujian data, menganalisa suatu masalah yang akan dibahas. Hal ini akan menghindari terjadinya anomali terhadap hasil kesimpulan yang nantinya diperoleh, dan membawa pada kesimpulan dan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Teori sangat diperlukan sebagai landasan pemikiran untuk mempermudah menganalisa permasalahan sehingga dapat dilakukan pembahasan yang mendalam dan sesuai dengan tema yang disampaikan.

Berdasarkan masalah yang penulis ajukan, maka di sini penulis mengacu pada teori kepentingan yang dikemukakan oleh Arnold Wolfers. Ia menyatakan bahwa tujuan dari politik luar negeri itu bisa diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu Pertahanan diri (*Self-Preservation*), Pengesahan Diri (*Self-Abnegation*), Pengembangan Diri (*Self-Extension*).

- Pertahanan Diri (*Self-Preservation*)

Pertahanan diri di sini berarti upaya untuk melindungi dan mempertahankan diri terhadap perkembangan perubahan nilai atau yang bisa disebut dengan status quo. Pertahanan diri dapat dikatakan mempunyai makna ganda⁹, yaitu:

1. Mempertahankan integritas wilayah dan kemerdekaan nasional negaranya sendiri.
2. Mempertahankan seluruh kepentingan nasionalnya yang ada di luar negara.

Adanya makna yang ambigu tersebut dikarenakan pengertian dari perubahan nilai (internasional) yang sangat kabur. Dalam artian, apakah perubahan nilai yang terjadi di dalam negaranya sendiri atau perubahan nilai yang mengganggu kepentingan nasional di luar negaranya. Sehingga, pengertian mempertahankan diri di sini bersifat internal atau eksternal, demikian pula halnya dengan pengertian status quo.

- Pengembangan Diri (*Self-Extension*)

⁹ Arnold Wolfers. *Ends and Means of Foreign Policy : The pole of Indifference*. Dalam James N. Rosenau. New York: The Press, 1969. Hal 177-178

Merupakan pengembangan dari self-preservation, yang mencakup semua tujuan kebijakan yang menyatakan untuk nilai-nilai yang telah diperoleh dan hingga tuntutan terhadap perubahan status quo. Tujuan itu mungkin lebih pada kekuasaan, dominasi atas bangsa lain atau ekspansi wilayah, tetapi mungkin juga menunjukkan sebuah pencarian untuk kembalinya wilayah yang hilang, menghentikan adanya diskriminasi yang tidak adil, pembebasan dari penguasaan asing atau kerugian atas ideologi lain.

- Pengesahan Diri (*Self-Abnegation*)

Adalah upaya mencari pengakuan atau pengesahan kedua hal di atas. Hal ini dapat diartikan bahwa setelah tujuan-tujuan di atas tercapai, maka selanjutnya adalah mengejar tujuan-tujuan yang lebih penting dari (jika tidak mengorbankan) kepentingan nasional. Tujuan tersebut menempatkan nilai lebih tinggi di atas tujuan-tujuan solidaritas internasional, kebenaran, kejujuran atau perdamaian daripada keamanan nasional dan pertahanan diri. Hal tersebut juga merupakan tujuan dari individu-individu, kelompok atau rezim yang mengorbankan bangsa sebagai keseluruhan penggunaan pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan sub-nasional.

Berdasarkan teori kepentingan yang disampaikan oleh Arnold Wolfers¹⁰, pemerintah Amerika Serikat melibatkan Halliburton dan Blackwater dengan alasan untuk mempertahankan diri dari ancaman kelompok-kelompok pejuang dari dalam maupun luar Irak yang tidak menginginkan keberadaan tentara Amerika Serikat berada di Irak dan untuk mempertahankan kepentingan nasional Amerika Serikat atas Irak. Selanjutnya keberadaan Halliburton dan Blackwater digunakan untuk pengembangan diri Amerika Serikat untuk menguasai penuh Irak beserta aset-aset nasionalnya yang berguna untuk kepentingan Amerika Serikat, misalnya industri-industri minyak di Irak.

¹⁰ *Ibid.*, Hal: 178.

Pengesahan diri dilakukan untuk mewujudkan upaya pengembangan dan pertahanan diri Amerika Serikat di Irak dengan mengikutsertakan Halliburton dan Blackwater dalam proses rekonstruksi Irak pasca invasi yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak pada Mei 2003. Invasi tersebut digunakan sebagai langkah awal pencapaian tujuan nasional Amerika Serikat untuk menguasai Irak.

Berdasarkan pemaparan di atas, keputusan Amerika Serikat untuk mengikutsertakan Halliburton dan Blackwater dalam proses rekonstruksi di Irak didasarkan pada harapan keduanya mampu mendukung kepentingan Amerika Serikat di Irak dengan keahlian yang mereka miliki merupakan suatu keputusan yang tepat untuk mendukung tujuan tersebut.

Dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, rasionalitas memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diputuskan para pengambil kebijakan sangat kental dengan unsure-unsur rasionalitas dalam bentuk kalkulasi strategis dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang di dapat. Siapa yang mengusulkan kebijakan paling rasional, dialah yang memenangkan perebutan pengaruh di sekitar Bush. Sebaliknya, siapa yang mengusulkan kebijakan dengan tingkat rasionalitas lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lain, bersiaplah untuk kalah pengaruh.

Berkaitan dengan rasionalitas dalam bentuk kalkulasi strategis dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diambil oleh Bush maka penulis menggunakan *decision making theory* Graham T. Allison. Allison mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ketiga model tersebut adalah model aktor rasional, proses organisasi, dan proses politik-birokratik.

Dalam penelitian ini, penulis menggacu pada model pembuatan keputusan yang diajukan oleh Allison yaitu model politik-birokratik¹¹. Menurut Allison politik luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi. Ini melibatkan berbagai permainan tawar-menawar di antara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial, bukan proses intelektual. Menurut model politik-birokratik, proses pembuatan keputusan adalah proses politik. Politik luar negeri muncul dari proses politik normal berupa tawar-menawar, kompromi, penyesuaian diri, dan sebagainya. Inilah inti dari proses sosial pembuatan keputusan.

Jadi, dalam model ini digambarkan suatu proses di mana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional. Setiap pemain, seperti Presiden, para menteri, penasehat, jenderal, anggota parlemen, dan lain-lainnya, berusaha menetapkan tujuan, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan melalui suatu proses intelektual. Dan tidak ada pemain yang bisa memperoleh semua yang diinginkan dalam proses ini. Masing-masing memiliki pamrih yang berbeda terhadap isu yang diperdebatkan. Masing-masing melihat isu itu secara berbeda, mempertaruhkan sesuatu yang berbeda dalam permainan itu, dan karenanya mengambil sikap yang berbeda tentang isu tersebut.

Dengan demikian, unit analisis dalam model politik-birokratik adalah tindakan pejabat-pejabat pemerintah dalam rangka menerapkan wewenang pemerintah dalam rangka menerapkan wewenang pemerintah yang bisa dirasakan oleh mereka yang ada di luarnya. Hal ini sehubungan dengan keputusan pemerintah Amerika Serikat melibatkan Halliburton dan Blackwater Security Consulting dalam proses rekonstruksi Irak pasca invasi Amerika Serikat.

¹¹ Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994). Hal. 234

1.5.1 Penelitian Sebelumnya

Pada tahun 2008, Hendy Wahyu K. A. mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember dalam skripsinya yang berjudul Peranan Diamondworks dalam Eskalasi Konflik Blood Diamonds di Sierra Leone, menjelaskan keterlibatan PMC Executive Outcomes (EO) dan Sandline dalam konflik di Sierra Leone. Kedua PMC ini bekerja untuk mengawal keberadaan Diamondwork, sebuah perusahaan tambang berlian yang beroperasi di Sierra Leone. Tugas lain dari kedua PMC tersebut adalah untuk menjaga keamanan wilayah tambang berlian dari ancaman pemberontak lokal yang juga ingin mengeksploitasi tambang berlian yang ada di Sierra Leone, di sinilah konflik antara Diamondwork yang di lindungi oleh PMC menghadapi penduduk lokal Sierra Leone terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemberi wewenang/tugas kepada para tentara bayaran. Jika EO dan Sandline disewa oleh perusahaan tambang berlian dan bertanggung jawab kepada Diamondwork. Sedangkan Halliburton dan BSC di Irak disewa dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan Amerika Serikat. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bekerja meenjaga keamanan wilayah konflik.

1.6 Argumen Utama

Dengan mengacu pada kerangka teori dan konsep di atas, maka penulis mencoba merumuskan argumen utama sebagai berikut :

Keputusan Amerika Serikat melibatkan Halliburton dan Blackwater Security Consulting pada proses rekonstruksi Irak pasca invasi Amerika Serikat ke Irak, dilatarbelakangi oleh adanya kedekatan antara pemerintah Bush dengan para korporat yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan George W. Bush. Kedekatan tersebut tercermin dari banyaknya korporat yang berada dalam lembaga pemerintahan dan lembaga non-pemerintah yang disertai dengan usulan kebijakan korporat yang mempunyai rasionalitas tinggi.

Dengan menyewa tentara bayaran yang tergabung dalam Halliburton dan Blackwater Security Consulting yang telah memiliki kedekatan dengan pemerintahan Bush, maka keberadaan aset-aset Amerika Serikat yang berupa minyak di Irak akan terjamin keamanannya. Kebijakan Amerika Serikat menggunakan jasa Halliburton dan Blackwater di Irak merupakan keputusan yang sangat menguntungkan. Kebijakan ini diambil karena minim resiko dan kecil pembiayaannya. Bagi pemerintahan keuntungannya adalah mendapat kompensasi dari pihak swasta yang mengelola bisnis tentara bayaran.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan melalui serangkaian proses yang sistematis untuk menambah pengetahuan baru. Metode penelitian diperlukan untuk menuntun kita dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan demikian, penelitian akan lebih obyektif dan mendekati kebenaran. Suatu penelitian akan lebih reliabel jika penelitian tersebut menggunakan metode yang benar.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak diperoleh dari

cara langsung atau bukan dari data primer melainkan dari data sekunder. Dengan demikian penulis tidak langsung melakukan penelitian ke lapangan. Data-data yang digunakan antara lain :

1. Buku-buku literature yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat; dan
2. Jurnal dan artikel yang berasal dari situs-situs resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Dalam upaya mendapatkan data yang valid dan mencukupi, penulis menggunakan beberapa pusat informasi, yaitu :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Media Internet; dan
4. Koleksi Pribadi.

1.7.2 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, terdapat analisa data yang dimulai dari pengambilan data mentah dengan teori dan konsep yang digunakan sebagai panduan. Data mentah yang didapat kemudian diurutkan secara sistematis sehingga data yang diperoleh sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat. Analisa data kemudian diolah sehingga terdapat gambaran yang jelas untuk diinterpretasikan. Interpretasi merupakan pemahaman terhadap informasi. Interpretasi ini yang kemudian dideskripsikan dengan teori dan konsep yang ada.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penggunaan metode kualitatif didasari alasan karena data utama yang diperoleh disini berupa data sekunder, sehingga tidak bisa diukur secara langsung. Metode

kualitatif ini, akan digunakan untuk melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap fenomena-fenomena yang dikaji.¹²

Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder yang dipakai mayoritas berupa pendapat orang dan data pendukung kualitatif lain yang mencerminkan sikap, perilaku, pandangan dan ideologi seseorang yang tercermin dalam berbagai bentuk publikasi, baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan analisis data itulah kemudian kesimpulan dalam proses menjawab permasalahan dilakukan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk membahas argumen pada tulisan ini, penulis menawarkan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB II memaparkan kemunculan PMC dalam Hubungan Internasional dan perkembangannya pada Pasca Perang Dingin, subbab kedua akan dijelaskan signifikansi keberadaan tentara bayaran di wilayah konflik. Subbab terakhir pada Bab II juga akan di jelaskan gambaran umum tentang Halliburton dan Blackwater Security Consulting sebagai PMC. Selanjutnya pada BAB III merupakan kelanjutan BAB II yang akan membahas Keterlibatan Halliburton dan Blackwater Security Consulting di Irak Pasca Invasi Amerika Serikat. Masih dalam BAB III juga akan dijelaskan mengenai Infrastruktur Irak yang harus direkonstruksi pasca invasi Amerika Serikat dan subbab terakhir akan menjelaskan bagaimana posisi Amerika Serikat pasca melakukan invasi ke Irak.

BAB IV pada skripsi ini akan membahas tentang keputusan Amerika Serikat melibatkan Halliburton dan Blackwater Security Consulting pada proses rekonstruksi Irak pasca invasi Amerika Serikat ke Irak. Pada bab ini akan diuraikan analisis terhadap data yang didapat untuk memaparkan lebih lanjut tentang argumen utama dalam skripsi ini. Pada bab ini penulis akan memulainya dengan menjelaskan bagaimana sikap Amerika Serikat pasca invasi. Pada subbab selanjutnya, akan dijelaskan seberapa penting peran Halliburton dan Blackwater Security Consulting

¹² Lexy J. Meleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 2

untuk Amerika Serikat. Selanjutnya pada subbab ke tiga akan dijelaskan keputusan Amerika Serikat melibatkan Halliburton dan Blackwater Security Consulting pada proses rekonstruksi Irak.

BAB V akan berisi kesimpulan mengenai keputusan pemerintah Amerika Serikat menempatkan Halliburton dan Blackwater Security Consulting di Irak, dan ini merupakan penutup dari tulisan.



BAB II

GAMBARAN UMUM HALLIBURTON DAN BLACKWATER SECURITY CONSULTING SEBAGAI PRIVATE MILITARY COMPANY

Sejarah kemunculan tentara bayaran mungkin lebih tua dari catatan yang bisa dirujuk, keberadaan tentara bayaran mulai dikenal di Mesir sekitar tahun 1200-an SM. Pada saat itu pengakuan terhadap tentara bayaran sangat selektif. Latar belakang kesukuan sangat menentukan nilai jual kelompok tentara bayaran. Pedang dan tombak adalah senjata andalan mereka. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lengkap mengenai awal munculnya tentara bayaran dan keterlibatannya dalam konflik-konflik di dunia internasional, perkembangan PMC pasca Perang Dingin yang mengawali munculnya kembali PMC yang sebelumnya tidak banyak terlibat dalam konflik internasional juga akan dipaparkan. Selanjutnya signifikansi PMC di wilayah konflik serta profil tentang Halliburton dan Blackwater Security Consulting akan dijelaskan di bab ini.

2.1 Kemunculan Private Military Company dalam Hubungan Internasional

Untuk menjelaskan kemunculan PMC dalam hubungan internasional, penulis akan memaparkan sejarah awal kemunculan tentara bayaran. Banyaknya tentara bayaran yang digunakan dalam berbagai perang dan konflik bersenjata antarnegara inilah yang mengawali terbentuknya PMC yang digunakan sebagai wadah resmi bagi para tentara bayaran.

Secara umum yang disebut tentara bayaran adalah seorang atau kelompok sebagai tentara yang terjun ke medan tempur atau konflik peperangan yang tujuan utamanya keuntungan pribadi. Namun, sebelum mengenal tentara bayaran lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan keberadaan tentara bayaran. Istilah-istilah itu, antara lain paramiliter, milisi, dan pasukan khusus.

Selain tentara bayaran, ada istilah lain yang mirip, tetapi berbeda artinya yaitu paramiliter dan milisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paramiliter diartikan sebagai tentara yang memiliki senjata dan kemampuan tempur layaknya tentara militer, tetapi tidak tergabung dengan kesatuan-kesatuan militer resmi dalam suatu negara. Meskipun tidak dirahasiakan, mereka tidak ada dalam struktur organisasi militer resmi dalam suatu negara. Namun, mereka mendapatkan tunjangan serta keistimewaan dari pemerintah. Jika dilihat dari pasukan yang pernah ada, paramiliter biasanya adalah sekelompok penduduk sipil yang dilatih dan diorganisasikan secara militer dalam suatu negara. Paramiliter dapat memiliki berbagai fungsi sesuai tujuan organisasi di atasnya. Dapat pula dibentuk oleh pemerintah sebagai polisi paramiliter atau penjaga keamanan internal lain. Dalam beberapa kasus di dunia, pasukan ini adalah kelompok revolusioner yang menggunakan taktik tradisional atau gerilya untuk menentang pemerintah. Selain itu, juga sebagai milisi swasta yang bertujuan menegakkan ketertiban tanpa terkekang oleh aturan hukum. Paramiliter juga bias merupakan unit komando yang dibentuk oleh negara dan ditujukan untuk misi pertempuran non-tradisional yang beroperasi di luar kendali resmi militer. Kelompok lainnya mengadopsi organisasi militer dan aspek-aspek budaya serta disiplin militer, tetapi tidak ditujukan untuk pertempuran.

Paramiliter tidak selalu memiliki orientasi kepada kepentingan masyarakat, sekalipun mereka dekat dengan elemen sosial tersebut. Pada prinsipnya, paramiliter adalah sebuah kesatuan yang dibentuk berdasarkan sebuah tujuan yang belum tentu untuk kepentingan masyarakat. Biasanya paramiliter dibentuk oleh sebagian golongan yang memiliki cita-cita politis atau pembaharuan dalam masyarakatnya. Munculnya paramiliter didahului oleh organisasi masyarakat yang memiliki tujuan politik tentu dalam sebuah negara. Organisasi masyarakat tersebut dapat berupa partai politik atau organisasi pergerakan. Artinya, paramiliter memang identik dengan sekelompok masyarakat sipil yang memiliki suatu tujuan bersama.

Contoh nyata untuk paramiliter adalah Nazi di Jerman, saat di pimpin oleh Adolf Hitler. Nazi adalah sebuah organisasi politik yang berhasil menjadi penguasa di

Jerman dan menjadi musuh bersama saat Perang Dunia II. Awalnya Nazi adalah sebuah partai politik yang memiliki angkatan perang sendiri (paramiliter) di luar militer resmi. Cita-cita mereka memang melakukan perubahan di Jerman dengan jalan politis. Ketika berhasil menjadi penguasa di Jerman, Adolf Hitler memasukkan pasukan paramiliter Nazinya dalam struktur organisasi militer negaranya. Akhirnya, karakter politik Nazi itu sendiri. Yang menjadi catatan adalah sekalipun telah menjadi partai yang berkuasa, organisasi paramiliter tetap ada di tengah-tengah masyarakat Jerman.

Istilah lain yang kadang ada dalam bayangan kita saat mendengar kata tentara bayaran adalah milisi. Seringkali, kita mendengar atau melihat kata milisi dalam pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan suatu konflik atau perjuangan disuatu wilayah. Biasanya, sebutan milisi langsung merujuk kepada sekelompok pasukan yang berjuang untuk mencapai suatu tujuan yang tidak selalu bersifat politis. Sekali lagi, mereka berada di luar struktur organisasi militer resmi dalam suatu negara. Mereka berasal dari masyarakat sipil.

Kata milisi berasal dari bahasa latin, yaitu *milistya* yang artinya aktivitas militer. Dahulu, masyarakat Romawi Kuno memanfaatkan milisi untuk memerangi kriminalitas dan membantu menanggulangi bencana. Hal itulah yang kemudian membuat milisi diatikan juga sebagai aktivitas pertahanan. Dalam penggunaan selanjutnya, istilah ini digunakan terutama untuk merujuk kepada kelompok bersenjata. Jadi, milisi dapat kita artikan sebagai suatu kelompok penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk suatu aktivitas paramiliter. Milisi dapat memiliki tiga arti¹³ yang sedikit berbeda satu sama lain:

1. Pasukan cadangan resmi, yang terdiri atas tentara dari penduduk sipil.

¹³ Sukarwo, Wirawan. “*Tentara Bayaran AS di Irak : Tentara Bayaran*”. Jakarta: Gagas Media , 2009. Hal :7

2. Pasukan swasta non-pemerintah. Pasukan ini tidak harus secara langsung didukung oleh pemerintah suatu negara.
3. Seluruh anggota populasi laki-laki dalam suatu komunitas, kota, atau negara bagian, yang dapat mengangkat senjata untuk melawan tentara pendudukan.

Milisi berbeda dari angkatan bersenjata nasional suatu negara. Dia dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer reguler, atau dapat pula menentangnya, misalnya saja untuk melawan kudeta militer. Pada beberapa kasus, musuh dari para milisi adalah lawan pemerintah yang berkuasa itu sendiri. Sementara itu, pada kasus lain, peran atau bahkan kehadiran milisi adalah suatu kontroversi. Untuk alasan ini, batasan hukum, dapat diberikan terhadap mobilisasi dan penggunaan milisi. Kita dapat mengambil contoh nyata milisi Taliban di Afganistan. Mereka berjuang untuk mengusir Amerika Serikat dari wilayah Afganistan Pasca invasi pada 2001. Yang menjadi oposisi perjuangan mereka adalah pihak asing, yaitu Amerika Serikat, serta pemerintahan berkuasa di bawah presiden Hamid Karzai yang dianggap boneka Amerika Serikat.

Paramiliter dan milisi memiliki akar definisi yang sama, yaitu sama-sama berasal dari elemen masyarakat sipil dan terpisah dari struktur organisasi militer resmi negara. Perbedaannya terletak pada loyalitas perjuangan atau aktivitas mereka. Paramiliter memiliki loyalitas terhadap seseorang atau golongan yang membentuk mereka. Sementara itu, milisi cenderung memiliki loyalitas terhadap kepentingan rakyat sipil. Milisi seolah-olah dilahirkan oleh masyarakat sipil untuk menentang penindasan yang dilakukan oleh pemimpin ataupun bangsa asing. Oleh karena itu, istilah milisi sering dilabelkan kepada organisasi atau aktivitas paramiliter yang berjuang melawan penindasan di negaranya.

Istilah lainnya yang juga sering disamakan dengan tentara bayaran adalah pasukan khusus atau *special forces*. Padahal, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan utamanya antara keduanya adalah pada siapa mereka memberkan loyalitas. Pasukan khusus adalah kesatuan yang sengaja dibentuk di

dalam tubuh militer resmi sebuah negara untuk mendukung misi-misi berskala strategis. Sesuai dengan namanya, tentara dalam kesatuan ini memiliki beberapa keistimewaan yang membuat mereka disebut spesial (khusus) . Keistimewaan itu, antara lain dalam hal kerahasiaan dan persenjataan.

Pasukan khusus merupakan unit yang sengaja dibentuk di dalam tubuh militer dan berisi tentara-tentara pilihan dari unit lain. Setiap anggotanya, rata-rata memiliki kemampuan tempur di atas kemampuan pasukan regular. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki tingkat kecerdasan yang mumpuni untuk mendukung misi-misi yang mereka jalankan. Bahkan, beberapa unit pasukan khusus di dunia mewajibkan anggotanya untuk menguasai banyak bahasa asing.

Kita tidak dapat dengan mudah melihat sepak terjang mereka. Unit-unit pasukan khusus memang sengaja dirahasiakan dari masyarakat untuk menghindari bocornya informasi yang dapat menghambat aksi mereka di lapangan. Kerahasiaan menjadi hal yang sangat prinsip dalam tubuh pasukan khusus. Profil personil pasukan khusus dan persenjataan sulit diakses oleh masyarakat biasa. Oleh karena itu, jarang sekali terdengar kabar mengenai aksi pasukan khusus di media-media karena terkadang misi yang mereka lakukan pun dirahasiakan. Pasukan khusus hanya sering terlihat saat parade ulang tahun angkatan bersenjata atau saat mereka menggelar simulasi misi di tengah-tengah masyarakat. Di luar hal itu, semuanya tidak pernah terjangkau masyarakat. Bagi yang sering menyaksikan film-film Hollywood, terutama yang bergenre *action military* pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Delta Force, Navy SEAL, atau SWAT. Nama-nama itu adalah nama unit pasukan khusus yang dimiliki Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang sering dikomersialkan oleh industri perfilman di sana. Film-film itu menjadi salah satu referensi andalan bagi masyarakat awam untuk mengenali karakter pasukan khusus.

Sekarang kita akan masuk dalam bahasan tentang tentara bayaran itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah yang memiliki catatan tertulis dan dapat diikuti alur pertempurannya, untuk pertama kalinya tercatat penggunaan tentara bayaran adalah pada masa Mesir Kuno, saat Firaun Ramses II menginvasi daerah Kerajaan Hittite

yang dipimpin raja Muwatalis. Keduanya bertemu dalam Pertempuran Kadesh (Syria sekarang) pada 1294 SM. Dilihat dari segi kedudukan dalam perang, pasukan yang menggunakan *Chariot* (kereta perang) dan pasukan berkuda adalah kasta tinggi dari ketentaraan pada masa itu, khususnya di Timur Tengah karena faktor manuver dan dapat bergerak lebih cepat. Sedangkan pasukan infanteri atau pejalan kaki dengan unit-unit seperti pemanah, tombak dan petarung jarak dekat dengan kampak atau pedang, berasal dari orang-orang kasta rendah atau petani yang dibekali dengan pendidikan militer seadanya.¹⁴

Pertempuran Kadesh melibatkan 6.000 kereta perang dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk kelas dua infanterinya, Ramses II menggunakan tentara bayaran dari orang-orang Palestina sekitar 10.000 serdadu. Pada masa kejayaan kerajaan Assyria yang mempersatukan Mesopotamia (Irak sekarang) pada 1100 SM-600 SM, Assyria sering menggunakan tentara bayaran dari suku Akkad (Syria). Suku ini termasuk petarung tangguh satu lawan satu dan sebagai penghantam *flank* serta perusak kolom rapat lawan.¹⁵

Pada tahun 1282, didirikan sebuah perusahaan militer swasta pertama di dunia yaitu Ventura. Ventura didirikan di semenanjung Italia oleh dua orang pebisnis Jerman yaitu Werner Urslingen dan Konrad von Landau. Ventura adalah agen 3.000 serdadu Condottieri. Dua abad kemudian pada tahun 1459, muncul tentara bayaran yang sampai sekarang masih beroperasi yaitu Reislaufer dan Landsknecht. Reislaufer atau biasa disebut Halberdier karena membawa tombak panjang Halberd yang sejak dulu terdiri dari orang-orang Swiss masih bertugas menjaga negara Vatikan Roma¹⁶. Berlanjut pada abad ke 17, di laut ditandai kemunculan Buccaneer dan Privateer, yaitu kapal beserta awaknya yang dibayar untuk melakukan pembajakan dan perampokan kapal-kapal dagang dari Perancis, Belanda, Spanyol. Buccaneer dibayar Inggris untuk tugas-tugas kotor karena persaingan dagang tanpa harus menimbulkan

¹⁴ “Tentara Bayaran : *Berawal dari Mesir*”, Edisi Koleksi Angkasa, April 2006. Hal : 14-15.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 20.

perang antar kedua Kerajaan. Perbedaan antara Buccaneer dan Bajak Laut adalah pada pola serangan. Bajak Laut hanya menyerang di laut atau dari atas kapal, sedangkan Buccaneer juga melakukan *raiding* di daratan. Sedangkan Inggris terkenal dengan pasukan Gurkha. Kamar Dagang Inggris yang kesulitan menundukkan orang-orang gunung Nepal kemudian mempekerjakan Gurkha sebagai pasukan bayaran sejak 1817. Kiprah mereka sebagai mesin perang Inggris jauh lebih panjang daripada pasukan Sikh yang berasal dari wilayah Punjab yang punya bela diri Gatka. Mereka mulai membantu pasukan Inggris sejak 1857. Sementara Perancis dikenal membentuk jasa tentara bayaran dengan mendirikan Legiun Asing pada 1835. Pasukan ini berjuang di sejumlah palagan penting antara lain Afrika Utara, Italia, Mexico hingga Vietnam¹⁷.

Di awal Perang Cina-Jepang tahun 1936, Amerika Serikat belum ingin secara langsung terlibat dalam konflik di Asia. Tetapi Amerika Serikat mengirim Claire Chennault untuk membantu Cina membentuk American Volunteer Group (AVG) atau disebut *Flying Tigers*. Para pilot penerima gaji pokok sebesar 600-700 dollar Amerika Serikat per bulan. Tambahan ekstra bonus 500 dollar Amerika Serikat, akan diberikan Madame Chiang Kai Sek untuk setiap satu pesawat Jepang yang ditembak jatuh.¹⁸

Tentara bayaran atau *mercenaries* berangkat ke medan pertempuran dengan motivasi murni demi uang, tanpa tendensi nilai dan latar belakang membela ideologi, kebangsaan, atau aliran politik tertentu. Para tentara bayaran itu tidak terlibat dalam konflik intensitas tinggi, tetapi sangat potensial dalam perang intensitas rendah dan operasi-operasi pembersihan paska perang.

Keberadaan tentara bayaran yang tergabung dalam *Private Military Company (PMC)* merupakan suatu kajian khusus dalam ranah *Security Sector Governance (SSG)*, yang mencoba meninjau ulang peran dan fungsi aktor-aktor keamanan dalam

¹⁷ *Ibid.*, hal. 21.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 21.

modernisasi konflik dan globalisasi.¹⁹ Di negara-negara maju, rekrutmen personil tentara bayaran berasal dari mantan personil tentara yang telah habis masa dinas atau dikeluarkan dari dinas kemiliterannya karena indisipliner atau restrukturisasi. Tentara bayaran dalam hal ini mendapatkan keuntungan dengan kemampuan dasar dan pengalaman lapangan dari mantan tentara tersebut. Posisi yang tidak kalah pentingnya adalah pengurangan beban anggaran negara dalam membiayai personil yang terikat secara tetap. Tentara bayaran juga difungsikan sebagai kanal sosial penciptaan lapangan kerja dengan keberadaan tentara bayaran di sektor keamanan. PMC menawarkan bayaran yang sangat tinggi dibandingkan dengan tentara nasional.

Tentara bayaran bukanlah tentara resmi yang diturunkan di medan perang, keberadaannya sering kali memunculkan kontroversi. Mereka seringkali didapati pada daerah-daerah yang berkonflik, seperti di Afrika (Sierra Leone, Kongo dan Angola) para tentara bayaran berperang membela pihak yang bersedia membayar. Merujuk beberapa kasus yang berkembang menjadi isu internasional, khususnya yang banyak terjadi di Benua Afrika, akhirnya memaksa dunia internasional menerapkan aturan tegas tentang penggunaan tentara bayaran. Oleh karena itu keberadaan tentara bayaran diatur melalui Konvensi Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949. Berikut adalah kutipan Protocol Additional dari Geneva Convention dan terkait dengan Protection of Victims of Internasional Armed Conflicts (Protocol I) tertanggal 8 Juni 1977. Pasal 47 Protokol tambahan Konvensi Jenewa, menyatakan bahwa tentara bayaran adalah orang yang :

1. Direkrut secara khusus baik di dalam maupun luar negeri untuk bertarung dalam sebuah konflik bersenjata.
2. Benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam konflik-konflik.
3. Mengambil bagian dalam konflik-konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan dijanjikan, oleh salah seorang pihak dalam

¹⁹*Kontraktor Keamanan Partikelir*, dalam <http://polmas.com/2008/06/19/kontraktor-keamanan-partikelir-private-security-company/> (diakses pada 22 Desember 2008)

konflik tersebut, kompensasi materiil yang berjumlah besar, melebihi jumlah yang dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat diangkatan bersenjata dipihak tersebut.

4. Bukan berkewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dalam konflik tersebut maupun penduduk suatu wilayah yang dikuasa salah satu pihak.
5. Bukan anggota angkatan bersenjata salah satu pihak.
6. Belum pernah dikirim oleh sebuah negara yang bukan salah satu pihak dalam konflik untuk melaksanakan sebuah tugas resmi sebagai bagian dari angkatan bersenjata ini.

Kemudian berdasarkan Konvensi Jenewa III, seorang tentara yang tertangkap harus diperlakukan sebagai *Lawful Combatant*, dan oleh karena itu, dia termasuk orang yang dilindungi, dengan status tahanan perang sampai diadili. Pengadilan dapat memutuskan bahwa tentara tersebut adalah tentara bayaran dengan menggunakan kriteria dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 atau hukum domestik yang relevan. Pada titik ini, tentara bayaran dapat menjadi *unlawful combatant*²⁰, namun harus diperlakukan dengan rasa kemanusiaan, dan hak-haknya harus dijamin. Jika setelah persidangan, tentara yang tertangkap terbukti sebagai tentara bayaran, dia dapat memohon perlakuan sebagai seorang kriminal biasa dan dapat dituntut secara hukum. Tentara bayaran bukanlah seorang tahanan perang, oleh sebab itu mereka tidak dapat memohon pemulangan ketika perang berakhir.

Jaminan perlindungan bagi tentara bayaran sejauh ini terdapat pada kontraktor-kontraktor militer yang berhubungan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon), termasuk yang mendapatkan jaminan hukum tinggi walau faktor keselamatan tidak ada jaminan. Konvensi Geneva 1949 membedakan antara anggota angkatan bersenjata dan sipil. Anggota PMC jelas adalah sipil yang diberikan otoritas bekerja sama dengan militer di lapangan. Namun begitu mereka

²⁰ *Unlawful Combatant* (tentara tidak sah) atau *belligerent* adalah seorang warga sipil yang secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata di bawah Hukum Humaniter Internasional dan dapat dituntut dengan hukum domestik dari negara di mana peristiwa tersebut terjadi. Sehingga jika tentara tidak sah ini tertangkap maka dia tidak dapat diberi status tahanan perang.

tidak bisa dijadikan objek dari serangan militer. Mereka tetap dalam resiko tinggi karena tingkat kehadiran yang tinggi di dalam fasilitas militer. Tentara bayaran akan kehilangan hak perlindungan hukum bila mereka ikut mendukung operasi militer.

Kemunculan tentara bayaran dan PMC dalam hubungan internasional yang dimaksud adalah ketika jasa tentara bayaran mulai digunakan pada konflik-konflik yang melibatkan banyak tentara bayaran, PMC dan beberapa negara di dunia ini. Hal ini diawali pada masa Mesir Kuno sekitar tahun 1294 SM. Peristiwa inilah yang mengawali kemunculan tentara bayaran dan PMC di dalam hubungan internasional.

2.2 Private Military Company Pasca Perang Dingin

Bisnis tentara bayaran modern semakin berkembang pasca Perang Dingin. Kedua Blok yaitu blok barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok timur yang diwakili oleh Uni Soviet saling berebut pengaruh ideologi, minyak, obat bius, dan intan. Agar pergerakan negara-negara tersebut tidak terlalu mencolok maka negara-negara tersebut menggunakan tentara bayaran. Pola penggunaan PMC sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik ini mulai berkembang di awal decade 1990an. Beberapa sebab transformasi dalam maraknya aktivitas PMC di awal tahun 1990an²¹ adalah :

1. Selama Perang Dingin, pengaruh yang bersifat bipolar telah menciptakan ketegangan di dalam beberapa regional berdasarkan pengaruh yang mereka anut yaitu sekutu dan Soviet. Namun kemudian selesainya Perang Dingin menyebabkan orientasi negara-negara yang semula merupakan sekutu dari kedua blok²² tersebut berubah. Mereka lebih mementingkan pembangunan ekonomi,

²¹ *Bisnis nyawa: Bisnisnya para ex-tentara* dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0305/10/int5.htm> (diakses pada 23 Desember 2008).

²² Kedua blok tersebut terdiri dari Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.

perdamaian dan perdagangan. Sehingga solidaritas keamanan regional mulai menurun.

2. Peristiwa Magadishu pada tanggal 3 Oktober 1993 telah membuka mata dan perhatian beberapa negara besar terutama Amerika Serikat sebagai indikasi gagalnya misi PBB. Tercatat Amerika Serikat kehilangan 18 marinir elit dan 73 lainnya terluka saat tragedi *Black Hawk Down*. Kejadian ini memberikan *shock therapy* atas gagalnya kebijakan militer dan politik regional dengan menggunakan operasi militer. Resiko jatuhnya korban militer resmi benar-benar secara fundamental merubah kebijakan penggunaan operasi militer di wilayah konflik.
3. Akhir dari Perang Dingin membuat kedua kekuatan yaitu Soviet dan Sekutu mengurangi kekuatan militer mereka secara drastis. Amerika Serikat sendiri mengurangi kekuatan militernya hingga 30%. Mantan tentara terlatih inilah yang kemudian banyak menjadi bagian dari tenaga PMC.
4. Terakhir adalah jatuhnya Uni Soviet yang juga berimbas pada negara-negara aliansi blok timur. Negara-negara tersebut juga mengalami kejatuhan secara ekonomi dan politik. Akibat dari kejatuhan ini, banyak asset-aset militer Uni Soviet di negara-negara bekas aliansinya menggunakannya bagi keperluan komersil. Teknologi dan peralatan militer canggih berupa kapal perang dan pesawat tempur inilah yang banyak menjadi tulang punggung operasi berbagai PMC dunia.

Selain karena keempat hal di atas, tentara bayaran atau PMC merupakan bisnis yang menggiurkan. Karena itu, keberadaan perusahaan militer ini berkembang pesat dan menjadi fenomena baru dalam dunia internasional. Fenomenal karena memasuki dasawarsa 90-an jumlahnya semakin meningkat. Dari yang semula hanya belasan menjadi 50-an. Selepas tahun 2000, keberadaan mereka menjadi lebih dari seratus, sekarang PMC-PMC itu tersebar menggarap proyek di hampir 110 negara.²³

²³ "Tentara Bayaran : *Tentara Bayaran Pasca Perang Dingin*", Edisi Koleksi Angkasa, April 2006.
Hal : 20

Pasca Perang Dingin dominasi Amerika Serikat semakin kuat yang diiringi dengan diakuinya konsep demokrasi di hampir seluruh dunia, sejalan dengan itu globalisasi semakin meluas yang ditandai dengan adanya fakta bahwa aparat keamanan dianggap tidak lagi mampu memberi rasa aman bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan yang cepat dari PMC yang bergerak di bidang jasa keamanan. Mereka dibentuk untuk memenuhi tingginya permintaan akan penjagaan keamanan seiring dengan instabilitas dan intensitas konflik di suatu wilayah.

Tabel II.1

Daftar Private Military Company Internasional

No	Nama Negara	Nama PMC
1	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • 3D Global Solutions • Aedion • Alpha Point Security • AQMI Strategy Corp • Blackwater USA • Braddock Dunn & McDonald (BDM) • C3 Defense, Inc. • CACI - California Analysis Center, Incorporated • Critical Intervention Services • Berodt Dynamics • Defion Internasional • DynCorp • Eastern Cross • Elite Security Corps • ITT Corporation • ISCS International • Kellogg Brown and Root (Halliburton) • Landmine Sourcing • Military Professional Resources Inc. • ManTech International Corporation • Northbridge Services Group • Northrop Grumman • Ronin Worldwide Executive Protection, LLC • Raytheon • SCG International Risk • SkyLink USA • SOS Temps, Inc • Spartan Consulting Group

		<ul style="list-style-type: none"> • Tactical Response Services • Titan Corporation • Top Cat Marine Security • Triple Canopy, Inc. • Vinnell Corporation • VIP Investigations & Protective Services Inc. • EUBSA BV Inc. STOP units - Special Tacs and Operations
2	Britania Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Adson Holdings • Aegis Defence Services • AKE Group • Armor Group • Branch Energy • Corporate Warriors • Defence Services • Erinys International • Gurkha Security Guards • Hart Security Limited • Hostile Control Tactics • Sandline International • Plaza 107 • Securiforce
3	Afrika Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Outcomes • Meteoric Tactical Solutions • Omega Security Solutions • Strategic Resources Corporation
4	Kanada	<ul style="list-style-type: none"> • Diamond Works
5	Israel	<ul style="list-style-type: none"> • IPIH • Levdan
6	Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> • Omega Group
7	Dubai, UEA	<ul style="list-style-type: none"> • Eriys International Ltd
8	Rusia/Ukraina	<ul style="list-style-type: none"> • OMEGA SERVICES

Sumber: http://library.corporate-ir.net/library/67/676/67605/items/199968/KBR_S1.
(diakses pada 03 Januari 2009).

Dari table 2.1, dapat diketahui bahwa PMC ternama pada umumnya berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Afrika Selatan. Dan negara-negara utama tempat PMC-PMC itu kini mencari uang ada di wilayah Afrika, Amerika Selatan,

Asia dan Timur Tengah. Mereka biasanya datang menyertai atau setelah kekuatan militer sebuah negara datang oleh karena keperluan teknis. Keberadaan mereka berkaitan dengan misi penyerbuan seperti invasi Amerika Serikat ke Irak, pelatihan militer, operasi intellegent, pesanan logistik, misi kombat pesanan pemerintah setempat, atau gelar jasa keamanan.

Contoh untuk jasa keamanan yang diberikan oleh tentara bayaran adalah seperti yang dilakukan oleh Hamid Karzai. Karzai tidak percaya dengan pasukan pengamanan dari negaranya sendiri. Hamid Karzai memilih untuk mendatangkan pengawal dari negara lain karena sejak memerintah, jiwanya sering mengalami upaya pembunuhan. Lawan politik Karzai telah masuk ke dalam lingkaran dalam. Karzai tidak percaya pada rakyatnya sendiri dan menganggap perlu menggunakan *bodyguard* profesional yang biasa disebut tentara bayaran. Meski terkesan miskin dan gersang, negara Afganistan yang dipimpin oleh Hamid Karzai adalah negara yang kaya cadangan minyak dan gas, serta terkenal sebagai penghasil opium kualitas terbaik di dunia. Ketiga hal itulah yang menyebabkan Afganistan diperebutkan oleh *warlord* (penguasa wilayah) dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris dan Rusia. Hal inilah yang menyebabkan negara ini sering diguncang konflik. Karzai tidak mau mengambil resiko, oleh sebab itu Karzai meminta Amerika Serikat memberi perlindungan. Amerika Serikat menugaskan pasukan elitnya untuk melakukan pengawalan terhadap Karzai. Sebagai pengawal Karzai, keberadaan pasukan elit Amerika Serikat mendapat permasalahan hukum di Afganistan. Karena alasan inilah keberadaannya digantikan oleh tentara bayaran milik DynCorp sebuah PMC asal Amerika Serikat.

Perbedaan paling mencolok dari bentuk tentara bayaran yang ada saat ini dengan tentara bayaran sebelumnya terletak organisasi yang menampung mereka . Pada era-era sebelumnya, tentara bayaran hanya berisi sekelompok pasukan orang yang tidak jelas statusnya entah tentara atau bukan, rela berperang untuk mendapatkan bayaran. Sementara itu, saat ini tentara bayaran adalah suatu bidang usaha yang dikelola dengan sangat profesional dan kontroversial. Pengelolaan ini

disandarkan pada manajemen perusahaan yang mengelola mereka. Layaknya perusahaan bisnis, mereka akan memberikan servis yang terbaik demi upah yang sesuai dengan resiko yang ada. Alasan lain dari tentara bayaran yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan itu adalah karena profit yang dihasilkan memang lebih menjanjikan dibandingkan dengan berada dalam dinas regular. Bahkan saat ini, tentara bayaran yang bertugas di Irak secara terbuka menyatakan bahwa dirinya memang memilih untuk meninggalkan pakaian dinas resmi dan bergabung dengan perusahaan tentara bayaran. Motivasinya jelas bahwa pekerjaannya sekarang jauh lebih menguntungkan.

Pada era ekonomi seperti sekarang ini, tidak ada satu negara pun yang tidak ingin memperoleh keuntungan. Meskipun negara itu adalah negara kaya seperti Amerika Serikat. Keberadaan PMC adalah salah satu sumber finansial Amerika Serikat. Maka, wajar jika negara ini seolah-olah membiarkan, bahkan mempertahankan mati-matian aktivitas PMC mereka di wilayah konflik. Sekalipun banyak sekali kritikan dan kecaman dari berbagai pihak, PMC-PMC akan tetap bertahan dalam regulasi yang dapat melindunginya.

Dari paparan di atas bisa diketahui bahwa maraknya kemunculan tentara bayaran dan PMC dimulai lagi pasca Perang Dingin. Hal ini dikarenakan pasca Perang Dingin banyak negara mengurangi secara drastis tentara nasional mereka. Peristiwa ini yang kemudian berdampak pada banyaknya tentara yang masih produktif tidak memiliki pekerjaan lain. Seperti kita ketahui bersama pada pasca Perang Dingin masih banyak ladang bisnis yang bisa dimasuki oleh PMC-PMC tersebut, salah satunya adalah proyek rekonstruksi, pengawalan pejabat-pejabat penting suatu negara, pelatihan tentara-tentara nasional suatu negara dan pendampingan keamanan perusahaan.

2.3 Signifikansi Keberadaan Private Military Company di Wilayah Konflik

Untuk menjelaskan signifikansi keberadaan PMC di wilayah konflik, penulis akan menjelaskan bagaimana pengaruh dan keterlibatan tentara bayaran dan PMC pada wilayah-wilayah konflik. Sebagai contoh, untuk lebih memperjelas pemaparan dalam subbab ini akan dijelaskan beberapa keterlibatan PMC dalam berbagai konflik di wilayah-wilayah rawan konflik di berbagai belahan dunia.

Layaknya sebuah hukum ekonomi, ada uang ada barang. Seperti itulah keberadaan tentara bayaran di setiap konflik di dunia ini. Mereka selalu ada dalam setiap konflik di dunia ini. Mereka selalu ada di setiap konflik yang paling kontroversial sekalipun. Satu hal yang perlu kita cermati adalah jangan pernah membayangkan tentara bayaran yang pada era globalisasi sekarang seperti tentara bayaran yang ada pada zaman-zaman sebelumnya.

Irak dan Afganistan adalah dua dari banyak negara yang menjadi tempat tujuan PMC. Jejak mereka juga pernah diketahui di negara Angola, Sierra Leone, Nigeria, Zambia, Mozambik, Afrika Selatan, Colombia, Bosnia-Croatia, Papua, Taiwan dan Indonesia. Di Indonesia, kiprah PMC juga pernah ikut dalam konflik di Papua pada operasi pembebasan sandera pada 1996.

Perkembangan PMC yang bisa dikatakan fenomenal ternyata masih terus diperdebatkan. Ada yang tidak setuju keberadaan PMC terutama karena banyaknya kasus pelanggaran hukum. Ada juga pihak yang berpendapat bahwa keberadaannya tak perlu dihambat karena potensi peran positifnya dalam dalam sistem internasional. Meskipun keberadaannya sering mendapat kritik dan kecaman, PMC yang sering mendapat masalah hukum di wilayah penugasannya ini akan tetap terus dibiarkan beroperasi karena banyaknya *conflict of interest* di dalamnya. PBB yang merupakan organisasi tertinggi negara-negara juga tidak banyak ikut campur tangan dengan bisnis PMC ini.

Tentara bayaran bisa dimanfaatkan sebagai alat dan tameng untuk mempertahankan eksistensi atau keterlibatan negara maju di wilayah-wilayah konflik di mana kepentingan mereka berada. Dikatakan alat dan tameng karena mereka bisa menjadi kepanjangan mata dan tangan pemerintah. Sementara mereka sendiri tak

perlu menanggung resiko karena seluruh tanggung jawab di tempat tugas ada pada PMC yang telah disewa. Fakta seperti itu tampak di wilayah-wilayah konflik seperti Irak, Afganistan dan beberapa negara di Timur Tengah. Sudah banyak diketahui bahwa banyak negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris mempunyai kepentingan politis dan ekonomis di negara-negara yang hingga kini masih rusuh itu. Di Irak saja, menurut laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (pada April 2006) tercatat sudah lebih dari 400 personil tewas akibat serangan gerilyawan. Kebanyakan dari mereka adalah anggota pasukan pengamanan.²⁴

Executive Outcomes (EO) adalah PMC yang didirikan pada 1989 oleh mantan Letnan Kolonel South African Defence Force (SADF) Luther Eben Barlow. Pada akhir dekade 1980 saat politik apartheid di Afrika Selatan mulai runtuh, Pemerintah Afrika Selatan mulai mengurangi tenaga militernya dari yang semula 120.000 menjadi hanya 40.000 personil saja. Pengurangan tenaga militer inilah yang membuat Barlow dengan mudah mendapat tenaga terlatih bagi EO. Karena mayoritas anggota SADF telah mengalami berbagai macam pertempuran dalam melawan gerakan *African National Congress* (ANC) pimpinan Nelson Mandela. PMC yang semula berbasis di Afrika Selatan ini mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan tambang Branch-Heritage. Sebagian anggotanya adalah tentara bayaran. Tony Buckingham yang juga pimpinan Branch-Heritage mengirim mereka pertama ke konflik di Angola. Dari Angola mereka mulai bertugas dan kemudian berlanjut ke Sierra Leone. Pada 1993, EO yang mulai terkenal kemudian didaftarkan di Inggris. Namun karena dituduh terlibat dalam perang kotor di Angola dan Sierra Leone maka operasi PMC ini dibekukan pada 1999.

Tabel II.2
Negara Tempat beroperasinya PMC

No	Negara	PMC	Tahun	Keterangan
1	Sierra	Executive	Sepanjang era	Pasukan penjaga

²⁴ "Tentara Bayaran : *Tentara Bayaran dan Bencana Dunia*", Edisi Koleksi Angkasa, April 2006. Hal : 26.

	Leone, Angola dan hampir di 30 negara di Benua Afrika	Outcomes (Inggris)	90-an	keamanan tambang <i>GOD's (Gold, Oil and Diamonds) of greed</i>
2	Columbia	MPRI (Military Professional Resources Inc) (AS)	2000	Memberantas penyelundupan dan penggunaan barang-barang terlarang
3	Kroasia	MPRI (AS)	1994	Melatih tentara nasional untuk menghadapi perang melawan Serbia.
4	Irak	Halliburton (AS)	1991, 2003-sekarang	Invasi AS I, Rekonstruksi Irak
5	Irak	Blackwater Security Consulting (AS)	2003-sekarang	Rekonstruksi Irak
6	Irak	Aegis Defence Services (Inggris)	2003	Rekonstruksi Irak
7	Honduras	Sandinista (AS)	1987	Penyerangan Rio Yamilita- Honduras
8	Papua Niugini (PNG)	Sandline Internasional (Inggris)	1997	Melawan pemberontak (pemilik perusahaan pertambangan Panguna Copper Mines)
9	Vatikan	Swiss Guard		Menjaga Vatikan
10	Inggris	BAe System (Inggris)	1970	Membentuk angkatan bersenjata Arab Saudi
11	Arab Saudi	Virnell Corp (AS)	1960-an	Pendidikan dan pelatihan aparat keamanan
12	Nikaragua	Contra (AS)	1980	Menginvasi Nikaragua
13	Hampir diseluruh negara	Gurkha (Inggris dan berasal dari Pegunungan Himalaya-	PD I - PD II	Pendukung pasukan infanteri Inggris

		Nepal)		
14	Hampir seluruh dunia	Foreign Legion Prancis (Prancis)	PD I - PD II	Membantu pasukan resmi Prancis
15	Afganistan	DynCorp (AS)	2002-sekarang	Pengawal Presiden Hamid Karzai
16	Di banyak negara seperti Korea, Vietnam, Timur Tengah	DynCorp (AS)	PD II, Perang Dingin, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk	Pelatihan anggota militer, perang antinarkotika, transportasi udara, misi pengintaian, SAR, evakuasi medis udara, perawatan pesawat tempur
17	Kroasia	MPRI (AS)	1994	Melatih tentara nasional untuk menghadapi perang melawan Serbia.

Sumber : Tentara Bayaran, *Pengelola Tentara Bayaran*, Edisi Koleksi Angkasa, April 2006. Hal : 47-65

Pada tabel II.2 terlihat di negara mana saja keterlibatan PMC dalam berbagai konflik dan pelatihan. Negara-negara dunia ketiga yang juga disebut sebagai negara berkembang yang sarat akan konflik adalah salah satu alasan mengapa PMC-PMC banyak bermunculan di beberapa negara maju. PMC tersebut mempunyai kepentingan di negara berkembang yang sering dilanda konflik. Kepentingan-kepentingan tersebut misalnya pengaruh/power, minyak, dan berbagai aset sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh negara-negara berkembang yang kebanyakan tidak mampu mengelolanya. Hal itu kemudian menyebabkan mereka menyerahkannya pada tangan asing yang tanpa mereka sadari merugikan negara berkembang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri pernah mengungkapkan bahwa konflik di Afrika adalah akibat perebutan kekayaan alam. “Konflik di Angola merupakan perang berlian,” kata Felix Downes-Thomas ketika menjabat sebagai

Kepala PBB untuk Kantor Pendukung Perdamaian. Menurut Downes-Thomas, berlian-berlian itu tidak saja berguna untuk pembiayaan perang, tetapi juga sekaligus menjadi alasan utama peperangan. Perang dan anarki akan berkecamuk di Benua Afrika karena kawasan itu telah dieksploitasi oleh orang yang menawarkan iming-iming. Hal tersebut terbukti benar dengan berlanjutnya kekacauan di Benua Afrika.²⁵ Dalam perkembangannya, nama *mercenary* mulai tidak digunakan lagi. Dewasa ini, banyak diantara mereka lebih menyukai istilah *private military corporation*, *private military firm*, *military service providers*, atau *private military industry*. Istilah-istilah digunakan dengan alasan konotasi negatif yang melekat pada kata tentara bayaran/*mercenary*.

Munculnya kembali tentara bayaran dan PMC semakin banyak ketika berakhirnya Perang Dingin. Banyak PMC bermunculan, tidak hanya Amerika Serikat yang mendominasi keberadaan PMC. Inggris, Prancis dan Afrika juga banyak memiliki PMC ternama yang juga banyak beroperasi di berbagai negara, terutama di negara-negara rawan konflik seperti Timur tengah dan Afrika.

2.4 Mercenary dan Hukum Perang

Pada era 1960-1980-an, keberadaan *mercenary* telah ada di berbagai negara. Kelompok tentara bayaran bisa dengan mudah melintas batas negara dengan membawa senjata. Para *mercenary* tidak peduli dengan ideologi atau kepercayaan yang dianut. Di Afrika, tentara bayaran sering ditemui pada konflik-konflik internal pada negara tersebut. Di Angola, Sierra Leone dan Kongo sejumlah tentara asing berperang membela pihak yang membayar mereka.

Banyak kasus dan konflik yang melibatkan tentara bayaran yang kemudian berkembang menjadi isu internasional, khususnya yang banyak terjadi di Benua Afrika, akhirnya memaksa dunia internasional menerapkan aturan tegas soal

²⁵ www.kompas.com: 19 Maret 2004. (diakses pada 15 Juli 2008)

penggunaan tentara bayaran. Secara globalpun, sebenarnya aturan ini sudah dimasukkan dalam Konvensi Geneva 12 Agustus 1977. Aturan ini kemudian diperkuat dengan keputusan yang diperkuat dengan keputusan yang di buat PBB Organisasi Afrika Bersatu maupun perangkat hukum yang disiapkan sejumlah negara.²⁶

Perlu diketahui, bahwa banyak negara termasuk Amerika Serikat sendiri tidak menandatangani Protocol Additional GC 1977 (APGC77) ini. Dengan demikian walaupun aturan ini diterima secara luas, namun pada kenyataannya sangat sedikit yang menegaskan secara jelas pada praktiknya. Di bawah GC III, jika seorang prajurit tertangkap dalam sebuah pertempuran oleh musuhnya, ia harus diperlakukan sesuai hukum bagi tentara (*lawful combatant*). Untuk itu mereka juga harus diperlakukan sesuai *Protected Person* bagi prajurit yang dijadikan tahanan perang (POW) sampai prajurit tersebut dihadapkan kepada *competent tribunal* (GC III Art 5). Pengadilan (*tribunal*) yang akan memutuskan bahwa ia seorang tentara sungguhan atau tentara bayaran. Jika terbukti ia adalah *mercenary*, maka hukum yang berlaku terhadapnya adalah tentara yang tidak dilindungi hukum (*unlawful combatant*). Hal ini bukan berarti status hukum tentara tersebut tidak jelas. Ia masih punya hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dalam kasus tertentu, haknya terhadap keadilan dan hukum tidak akan dicabut. Hal ini dimungkinkan karena ia masih dilindungi oleh GC IV Art 5 jika tentara tertuduh tersebut adalah bagian dari sebuah otoritas sebuah negara. Jika demikian, ia tidak diperlakukan sebagai *mercenary* di bawah APGC77 Art 47.d.²⁷

Jika setelah peradilan ia terbukti tentara bayaran, selanjutnya mereka bisa mengharapkan perlakuan sebagai penjahat biasa dan bisa jadi akan menerima hukuman, karena bukan sebagai POW, ia tidak bisa menerima repatriasi atau pemulangan setelah perang berakhir. Dalam kasus ini bisa dicontohkan pada pasca Perang Dunia II. Pada tanggal 28 Juni 1976, pengadilan Angola menjatuhkan hukuman mati bagi tiga orang Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sembilan

²⁶ "Tentara Bayaran : *Ambivalensi PMC*", Edisi Koleksi Angkasa, April 2006. Hal : 30

²⁷ *Ibid.*, Hal: 31

lainnya dipenjara untuk jangka waktu antara 16 hingga 30 tahun. Yang dinyatakan dihukum mati akhirnya menerima keadilan di ujung laras tepatnya tahun 1968, Sekretaris Umum PBB dan Organisasi Afrika Bersatu telah menetapkan aturan hukum dalam melawan *mercenaries*. Aturan ini menjerat setiap usaha menggunakan tentara bayaran untuk melawan gerakan kemerdekaan, adalah tindakan kriminal.²⁸

Status resmi kontraktor sipil sangat tergantung dari lingkungan di mana mereka bekerja dan penghargaan terhadap kebangsaan mereka dari para tentara sesungguhnya. Namun jika mereka secara jelas-jelas merupakan bagian langsung dari permusuhan maka mereka bukanlah tentara bayaran dan dengan demikian berhak mendapat perlindungan dari Geneva Convention.

Situasi selama pendudukan Irak pada tahun 2003, menunjukkan bagaimana sulitnya mendefinisikan apa sesungguhnya *mercenary*. Sementara pemerintah Amerika Serikat memberikan penegasan kepada warga negaranya yang bekerja sebagai penjaga bersenjata, bahwa mereka tidak bisa disebut *mercenary*. Hal ini disebabkan, mereka adalah *a national Party to the conflict* (APGC77 Art 47. dl). Jika tidak ada peradilan yang bisa memutuskan status keterlibatan mereka, maka kemudian akan dikeluarkan pernyataan tanpa bukti yang makin lama akan menguap karena memang tidak bisa dibuktikan. Perlu diketahui bahwa tentara Koalisi yang bertugas di Irak yang bertugas mendukung pemerintahan sementara Irak, bukanlah dianggap sebagai *mercenary*. Hal ini dikarenakan mereka adalah bagian dari angkatan bersenjata dari kelompok yang bertikai atau mereka telah dikirim oleh negara yang tidak merupakan bagian dari kelompok yang bertikai sebagai perwira dinas dari angkatan bersenjata (APGC 77 Art 47.f).

Pada 4 Desember 1989, PBB mengeluarkan resolusi 44/34 tentang *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*. Resolusi ini diberlakukan pada 20 Oktober 2001 dan dikenal sebagai UN Mercenary Convention. Sejumlah kritik telah disampaikan bahwa konvensi dan

²⁸ *Ibid.*, Hal:32

APGC77 Art 47 dengan sengaja dirancang untuk menutupi aktifitas *mercenaries* pada waktu pasca kolonial Afrika.²⁹ Walaupun aturan global telah ditetapkan, sejumlah negara merasa masih perlu membuat aturan perkuatan untuk mengatur kegiatan para tentara bayaran di negara mereka (*domestic law*). Prancis, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Swiss, Inggris dan Austria mempunyai aturan tersendiri untuk hal ini. Negara-negara ini sepakat untuk menghentikan keterlibatan warga negaranya dalam konflik bersenjata terkecuali mereka di bawah kontrol kesatuannya. Prancis pada tahun 2003, menyebut sebuah aktifitas *mercenary* yang dilakukan warga negaranya sebagai kriminal. Afrika Selatan melalui Foreign Military Assistance Act melarang warga negara atau penduduknya terlibat dalam konflik di luar negeri kecuali mengikuti misi-misi kemanusiaan. Kecuali pemerintah mengeluarkan ijin untuk mengirim mereka ke wilayah konflik. Pada tahun 2005 pemerintah dan legislatif Afrika Selatan mengevaluasi aturan karena sejumlah warga negaranya bekerja di Irak selama pendudukan Irak. Hukum Amerika Serikat menggarisbawahi bahwa warga negara Amerika Serikat yang terlibat dalam konflik bersenjata yang mana Amerika Serikat bersikap netral atas hal ini. Sementara Swiss melarang warga negaranya untuk menjadi *mercenary*, kecuali menjadi Vatican Swiss Guards. Begitu juga dengan Austria, akan mengeluarkan surat pinalti kewarganegaraan kepada siapa saja yang menjadi *mercenary*. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan kewarganegaraan jika mereka bekerja sebagai tentara bayaran. Hal yang sama diterapkan oleh Inggris terhadap warga negaranya.³⁰

Pada kenyataannya tidak akan mungkin untuk menghapus aktifitas tentara bayaran di dunia. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kebijakan sejumlah negara maju melakukan rasionalisasi jumlah tentaranya pasca Perang Dingin. Banyak tentara kehilangan pekerjaan, hal inilah yang dimanfaatkan perusahaan penyedia jasa pengamanan untuk mempekerjakan mereka sebagai tentara bayaran. Kebutuhan itu semakin meningkat sejak Amerika Serikat melancarkan invasi ke Irak dan

²⁹ *Ibid.*, Hal:34

³⁰ *Ibid.*, Hal:35

Afganistan. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk menghapuskan tentara bayaran. Yang bisa dilakukan negara-negara di dunia hanyalah mengontrol mereka melalui hukum domestik dan diperkuat oleh hukum internasional.

2.5 Halliburton dan Blackwater Security Consulting (BSC)

Antara perlu dan tidak perlu, begitulah sebenarnya keberadaan tentara bayaran dan *Private Military Company (PMC)*. Istilah PMC dan tentara bayaran bagi sebagian besar orang dianggap sama. Sebenarnya kedua istilah ini berbeda. Tentara Bayaran adalah seorang tentara yang bekerja secara perseorangan/individu kepada sebuah negara atau perusahaan sebagai jasa pengawal atau sesuai dengan tugas yang diberika oleh pihak yang menyewa jasanya. Sedangkan PMC adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa tentara bayaran, pelatihan dan pendidikan bagi tentara nasional/para aparat keamanan lainnya, penyedia peralatan militer, perang antinarkotika, transportasi udara, misi pengintaian, SAR, evakuasi medis udara, perawatan pesawat tempur dan lain sebagainya. Di satu sisi mereka bisa menggantikan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tugas tentara reguler, namun di sisi lain mereka juga harus dijaga dan diawasi untuk menghindari tindakan-tindakan yang kadang di luar batas. Baik terhadap mereka maupun dilakukan oleh mereka sendiri. Untuk itu, PBB sudah mengeluarkan sejumlah aturan guna menegaskan Konvensi Geneva. Pada dasarnya tugas antara PMC dan mercenaries tidak jauh berbeda. Keduanya bekerja atas dasar kontrak yang telah disepakati. Bedanya adalah jika PMC bekerja secara transparan atas dasar kontrak resmi dan sepengetahuan negaranya. Sebaliknya mercenaries beroperasi betul-betul tertutup, keberadaannya hanya diketahui oleh dirinya sendiri atau organisasi pengelola dan pihak pengontrak. Hingga saat ini, diperkirakan ratusan PMC beroperasi di seluruh dunia , dengan jumlah terbesar ada di Amerika Serikat. Berikut dua dari sejumlah PMC Amerika Serikat yang terbesar dan termmodern yaitu Halliburton dan Blacwater Security Consultin

2.5.1 Halliburton

Nama Halliburton berasal dari seorang pengusaha asal Oklahoma yang bernama Erle P. Halliburton. Erle P. Halliburton mendirikan perusahaan bernama New Method Oil Well Cementing Company pada tahun 1919 di Oklahoma. Setelah satu tahun, nama perusahaan itu diganti menjadi Halliburton Oil Well Cementing Company. Setelah Erle P. Halliburton wafat, pada 1957, ia meninggalkan 201 kantor perwakilan di 22 negara bagian Amerika Serikat dan 20 negara asing.³¹

Pada 1962, Halliburton menggabungkan diri dengan Brown & Root, sebuah perusahaan kontraktor umum yang didirikan oleh Herman Brown, George Brown serta Daan Root. Perkembangan selanjutnya, yaitu pada 1998 saat Halliburton melakukan merger atau pengabungan dengan Dresser Industries, sebuah perusahaan jasa pelayanan energy yang didirikan oleh Solomon R. Dresser. Dari hasil penggabungan itulah, Halliburton mendapat perusahaan M.W. Kellog yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak dan pembuatan pipa minyak. Perusahaan M.W. Kellog didirikan oleh Morris W. Kellog pada 1900. Pada 2002, secara resmi Halliburton mengumumkan deversifikasi usaha mereka ke dalam dua sector bisnis, yaitu Halliburton Energy Servis Group dan Kellog Brown & Root (KBR).³²

Perusahaan ini lebih dikenal dengan aktivitasnya dalam bidang energy dan konstruksi. Dalam *website* resminya, disebutkan jumlah karyawan perusahaan ini mencapai lebih dari 100.000 orang yang bekerja di lebih dari 120 negara.³³ Dari informasi yang didapat dari *website* resminya, tidak tampak aktivitas bisnis penyewaan tentara bayaran yang mereka lakukan. Padahal, Halliburton adalah perusahaan yang mendapatkan kontrak rekonstruksi Irak dengan anggaran paling besar. Jumlah anggaran yang mereka dapatkan mencapai sekitar US\$ 8 miliar.

³¹ Corporate Profile. – www.halliburton.com (diakses pada 19 Oktober 2008)

³² <http://ir.halliburton.com/phoenix.zhtml?c=67605&p=irol-homeprofile>

³³ www.halliburton.com/default/main/halliburton/eng/news/source-files/press-release

Sebagai gambaran umum nilai kontrak yang diberikan pada PMC biasanya hanya berkisar puluhan juta dolar.

Di antara PMC di dunia, Halliburton bisa dikatakan PMC yang paling makmur dan dimanjakan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Dalam megaproyek membangun kembali Irak, Pemerintah Amerika Serikat memilih Halliburton sebagai rekanan utama dengan kontrak mencapai delapan milyar dollar Amerika Serikat. Hal ini tidak lepas dari campur tangan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney yang pernah menjadi CEO Halliburton. Cheney menjadi CEO Halliburton menjadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada 1989-1993. Cheney memegang perusahaan ini bersama Gribbin yaitu deputinya di Pentagon. Keduanya inilah yang menyerahkan megaproyek Irak senilai 2,2 milyar dollar kepada Halliburton. Kontrak-kontrak tersebut dikategorikan besar karena nilai kontrak untuk PMC pada umumnya hanya sekitar puluhan juta dollar.³⁴

Sebagai perusahaan jasa pengolahan minyak dan gas bumi, Halliburton sebenarnya sudah berdiri sejak 1919. Namun reputasinya di bidang PMC baru mencuat dan jadi pembicaraan setelah Amerika Serikat menyelesaikan invasi pertamanya di Irak pada 1992, Pentagon mengontrak perusahaan ini untuk menyiapkan program dukungan bagi Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri. Walau hanya dalam bentuk studi, mereka sudah diberi dana sembilan juta dollar Amerika Serikat. Halliburton juga yang menjadi perusahaan rujukan pertama para prajurit ketika Washington memaksa memberhentikan tentaranya setelah Perang mantan tentara Amerika Serikat.³⁵

Tugas yang diberikan kepada Halliburton tersebut berhasil dengan baik. Dengan keberhasilan ini, Halliburton menjadi rujukan utama ketika Pemerintah Amerika Serikat mempunyai proyek besar di negara lain. Tidak lama setelah mendapat kontrak dari Pemerintah Amerika Serikat yang senilai sembilan juta dollar tersebut, Halliburton mendapatkan kontrak lagi dari Pemerintah Amerika Serikat

³⁴ "Tentara Bayaran : *Pengelola Tentara Bayaran*", Edisi Koleksi Angkasa. April 2006. Hal: 60.

³⁵ *Ibid.*, hal. 60.

senilai 2,5 juta dollar untuk proyek pendirian pangkalan militer di sejumlah tempat rahasia. Kedekatan Halliburton dengan kalangan militer ternyata banyak dipengaruhi oleh latar belakang pemimpinnya sendiri. Tidak lama setelah Cheney meninggalkan Halliburton, posisinya digantikan oleh seorang perwira tinggi yaitu Admiral Joe Lopez. Lopez adalah mantan Komandan Amerika Serikat wilayah Eropa Selatan.³⁶

Irak bukan wilayah konflik pertama yang pernah di datangi oleh Halliburton. Antar 1962 sampai 1972 Pentagon pernah menugaskan Halliburton untuk membuat jalan, lapangan terbang, dan pangkalan militer di Vietnam Selatan. Mulai dari daerah demiliterisasi sampai ke Delta Mekong. Saat itu mereka dibayar sampai 10 juta dollar. Pentagon juga yang mengirim mereka ke Diego Garcia, Samudera Hindia, untuk membuat pangkalan militer.

Dalam proyek membangun Irak, mereka ikut menikmati emas hitam negara tersebut. Mereka mengerahkan sampai 24.000 personil atau $\frac{3}{4}$ dari total pekerja asing yang dipekerjakan di Irak. Mereka mengerjakan banyak proyek seperti menggali jamban, mengantar logistik, mencukur rambut, menyiapkan makan, dan melayani jasa surat menyurat untuk kepentingan tentara Amerika Serikat. Ribuan pekerja yang dipekerjakan umumnya berasal dari kota-kota miskin di Amerika Serikat. Mereka rata-rata tidak peduli dengan resiko kehilangan nyawa karena sejak mendaftar yang mereka inginkan hanya upah yang mencapai 100.000 dollar setahun. Akibatnya, hingga tahun 2006 tercatat sudah 61 personil Halliburton tewas terbunuh. Semula keluarga yang ditinggalkan diam saja. Namun, keadaan berubah setelah kantor pengacara terkenal Lopez, Hodes, Restaino, Milman dan Skikos mengajukan gugatan keluarga mendiang Tony Johnson, satu dari enam supir truk Halliburton yang tewas disergap separatis Irak pada 9 April 2004. Peristiwa ini terjadi di jalur genting Kamp Anaconda-Bandara Internasional Baghdad.³⁷ Penyerangan terhadap konvoi truk pengangkut minyak dengan 19 sopir, dan dua orang yang menjadi korban tersebut diklaim sebagai kelalaian Halliburton. Mereka dinilai tidak waspada memberikan



³⁶ *Opcit.*, hal: 61.

³⁷ *Opcit.*, hal. 61.

perlindungan terhadap konvoi truk yang terlihat mencolok. Secara singkat profil Halliburton dapat dibaca pada tabel berikut ini.

Halliburton memakai anak perusahaannya yaitu Kellog Brown & Root untuk menjalankan bisnis tentara bayarannya di Irak. Jadi, jika membicarakan PMC asal Amerika Serikat di Irak, kita tidak akan menemukan Halliburton sebagai salah satu PMC tersebut. Kontrak di bidang tentara bayaran atau dalam istilah lain disebut pengamanan dijalankan oleh KBR sebagai anak perusahaan Halliburton. Sementara itu, Halliburton sendiri tampil sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi minyak bumi.

Tabel II.3
Profil Halliburton

1	Type	Public (NYSE: HAL)
2	Founded	1919, Dallas, Texas, U.S.
3	Founder(s)	Erle P. Halliburton
4	Headquarters	 Houston, Texas, USA  Dubai, United Arab Emirates
5	Area served	Worldwide
6	Key people	David J. Lesar (Chairman) & (CEO)
7	Industry	Oil & Gas Equipment & Services
8	Products	Technical services to the petroleum industry; Construction
9	Market cap	US\$ 32. 99 billion (2008)
10	Revenue	▲ US\$ 15.264 billion (2007)
11	Operating income	▲ US\$ 3.498 billion (2007)
12	Net income	▲ US\$ 3.499 billion (2007)
13	Total assets	▼ US\$ 13.135 billion (2007)
14	Total equity	▼ US\$ 6.866 billion (2007)
15	Employees	100.000 work in 120.000 state (2008)
16	Website	Halliburton.com

Sumber: “Company Profile for Halliburton Co (HAL)” Halliburton.com.
(diakses pada 06 Oktober 2008)

Dari table 2.2 di atas, dapat dilihat tentang profil singkat dari Halliburton serta keunggulan Halliburton dibandingkan dengan PMC lainnya yang beroperasi di dunia. Halliburton juga sering disebut sebagai PMC paling makmur. Hal ini dikarenakan banyaknya proyek Pemerintah Amerika Serikat yang ditangani oleh Halliburton. Halliburton sering menjadi rujukan Pemerintah Amerika Serikat karena kedekatannya dengan Gedung Putih. Kedekatan ini terwujud karena banyak pemimpin Halliburton yang berasal dari militer dan pejabat pemerintahan Amerika Serikat.

2.5.2 Blackwater Security Consulting (BSC)

Blackwater adalah salah satu PMC milik Amerika Serikat yang didirikan oleh Mantan elit Angkatan Laut Amerika Serikat Erik Prince pada tahun 1997. BSC bermarkas di Moyock North Carolina Amerika Serikat. Blackwater adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyedia tentara bayaran. Tidak hanya jasa tentara bayaran saja yang ditawarkan oleh BSC, beberapa jasa yang ditawarkan BSC antara lain jasa pelatihan militer, pertahanan keamanan suatu wilayah (sampai sekarang BSC telah melatih lebih dari 100.000 polisi lokal), analisis SWAT (SWAT), serta jasa keamanan. BSC adalah lembaga sipil yang diberi wewenang kerja sama dengan unit-unit militer di dalam negerinya atau bahkan negara lain yang disetujui oleh departemen pertahanan negara yang akan ditempati.³⁸ Blackwater Security Consulting merupakan satu dari lima cabang bisnis Blackwater USA. Empat cabang bisnis lainnya adalah : Blackwater Training Center, Blackwater Target Systems, Blackwater Canine, dan Raven Development Group.

Lokasi-lokasi kantor Blackwater³⁹ antara lain di :

- Moyock, North Carolina, US: merupakan lokasi kantor pusat BSC yang di dalamnya terdapat tempat pelatihan lapangan tempak yang mempunyai jarak tembak 7000 ha dan fasilitas pelatihan mengemudi.

³⁸ <http://blackwatermediacenter.com/> (diakses pada 11 Januari 2009)

³⁹ <http://blackwatermediacenter.com/Profile Blackwaterworldwide>. (diakses pada 11 Januari 2009)

- San Diego, California, US: pusat pelatihan tantara nasional angkatan laut Amerika Serikat .
- Mount Carroll, Illinois, US: berbagai macam lokasi tembak dan fasilitas pelatihan-pelatihan lainnya.
- Kootenai County, Idaho, US: lokasi percobaan (baru dibuka) dengan berbagai fasilitas pelatihan.

Divisi-divisi yang dimiliki Blackwater⁴⁰ antara lain :

- ***Blackwater Airships*** : mengembangkan peralatan pengawasan militer dan mendeteksi RMAP (*Remotely Piloted Airship Vehicle*) yang mampu beroperasi antara 48 sampai 60 jam pada ketinggian 5.000 sampai 15.000 kaki.
- ***Blackwater Armor & Targets*** : bertugas membangun dan memelihara tempat pelatihan tembak.
- ***Blackwater Canine (K-9)***: bertugas menyediakan pelatihan dan mencegah peredaran narkotika dan bahan peledak dan melatih anjing pelacak.
- ***Blackwater Lodge and Training Center***: memiliki tempat pelatihan menembak pribadi paling besar dan pusat pelatihan strategi di Amerika Serikat, bertempat di Moyock, North Carolina.
- ***Blackwater Logistics*** : menyediakan logistic bagi semua pekerja Blackwater yang bertugas seperti : pengawal keamanan, penyewaan anjin dan perlengkapan keamanan. Juga mencakup perlengkapan lainnya seperti (perlatan dan transportasi baik di laut maupun di udara).
- ***Blackwater Maritime***: bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan armada laut dan perlengkapannya serta alat untuk latihan dan simulasi mengatasi serangan bajak laut.

⁴⁰ <http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/SecurityWatch/Detail/?id=88527&lng=en> (diakses pada 11 Januari 2009)

- ***Blackwater ProShop***: menyediakan toko kenang-kenangan yang berlokasi di Moyock, di sini disediakan berbagai aksesoris yang berhubungan dengan Blackwater seperti pin logo, T-shirts, mug, mainan dan poster.
- ***Blackwater Security Consulting***: menyediakan tentara penjaga keamanan yang mengawal pemerintahan, diplomat dan jasa keamanan menjaga konvoi.
- ***Blackwater Training Corporation***: menyediakan pelatihan computer.

External Divisions (under Prince Holdings):

- ***Greystone Ltd.***: merupakan PMC yang berskala kecil digunakan dalam operasi luar negeri sebagai sarana untuk melebarkan sayap dan merekrut personil dari luar negeri.
- ***Prince Manufacturing***: Ini didirikan oleh ayah Erik Prince's, yaitu Edgar Prince, yang menyediakan pembuatan, perakitan produk-produk logam.
- ***Total Intelligence Solutions***: perusahaan penyedia jasa intelejen pribadi dan juga menawarkan jasa untuk pemerintah dan 1000 tentara bayaran yang siap siaga setiap waktu untuk memberikan informasi.

Sedangkan dalam merekrut anggotanya, selain mantan tentara reguler Amerika Serikat, Blackwater juga banyak merekrut mantan personil pasukan elit dari banyak negara seperti Inggris yaitu unit Special Air Services (SAS), Chile (pasukan Jendral Pinochet) dan veteran pasukan reguler dari sejumlah rezim, ada pula yang direkrut dari pasukan apartheid Afrika Selatan.⁴¹ Blackwater sebagai PMC dunia yang paling mutakhir di dalam kelengkapan dan sarananya. Blackwater juga merupakan satu-satunya PMC yang memiliki fasilitas paling lengkap, luas, modern, dan mutakhir. Bahkan tentara reguler Amerika Serikat sendiri sering berlatih di fasilitasnya Blackwater yang memiliki luas total 2.400 hektar are dan diperlengkapi dengan miniatur kota sebagai tempat berlatih perang kota.⁴²

Blackwater memiliki pusat latihan di hutan pinus dan peternakan kuda di Moyock, North Caroline, Amerika Serikat, tidak jauh jauh dari lokasi pelatihan

⁴¹ "Tentara Bayaran: *Blackwater Security Consulting*". Edisi Koleksi Angkasa. April 2006. Hal: 62

⁴² *Opcit*

tentara Amerika Serikat di Fort Bragg, ratusan bekas anggota pasukan komando dan tentara bayaran terbaik Amerika Serikat berlatih. Kompleks ini tidak hanya berisi barak untuk para tentara bayaran itu, tapi juga lapangan tembak hingga bangunan untuk latihan pembebasan sandera.⁴³

BSC juga menyediakan *Mobile Security Teams*, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang strategi militer. Blackwater Mobile Security Teams berada menyebar di seluruh dunia dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat yang dalam operasinya bersifat sangat rahasia. Blackwater Security Consulting sangat dekat dengan Angkatan Darat Amerika Serikat karena pendiri dan karyawannya adalah mantan tentara nasional yang masih mempunyai keberanian tinggi dan kemampuan tentara profesional. Blackwater bukan PMC sembarangan, dalam merekrut anggotanya selain mantan tentara reguler Amerika Serikat, Blackwater juga banyak merekrut mantan personil pasukan elit dari banyak negara. Hingga tahun 2006, menurut data resmi yang dikeluarkan, Blackwater telah menghasilkan 50.000 personil dengan kualifikasi tentara profesional⁴⁴.

Tabel II.4
Profil Blackwater Security Consulting

1	Type	Private Military Security Firm
2	Founded	1997
3	Founder(s)	Erik Prince
4	Headquarters	850 Puddin Ridge Road Moyonk, North Carolina, U.S.
5	Key People	J.Cofer Black Joseph E. Schmitz Gary Jackson Bill Mathews

⁴³ korantempo.com/view_details.php?idedisi=1363&idcategory=11&idkoran=10619&y=2004&m=04&d=03 - 8k - (diakses pada 11 Januari 2009)

⁴⁴ blackwater security.com/services.html. (diakses pada 18 Desember 2008)

6	Industry	Government contracting
7	Parent	Blackwater Worldwide
8	Website	BlackWaterUSA.com
9	Mercenary	20.000

Sumber: http://www.blackwaterusa.com/company_profile/core_values.html
(diakses pada 28 November 2008)

Pada table 2.3 di atas, dapat dilihat profil singkat mengenai BSC. BSC sering mendapatkan julukan PMC paling modern di dunia. Sebutan ini memang sudah selayaknya ditujukan pada BSC. Sebagai PMC yang dikategorikan modern, BSC memiliki berbagai fasilitas latihan tempur dan peralatan tempur yang sangat modern sebagai penunjang kekuatan BSC. BSC memiliki pusat latihan tempur yang sering digunakan latihan bagi tentara nasional Amerika Serikat. Sampai sekarang Blackwater masih sangat istimewa untuk pemerintah Amerika Serikat, Blackwater tidak hanya menjadi sebuah PMC kesenangan Pemerintah Amerika Serikat akan tetapi keberadaan Blackwater sekarang ini sudah sampai pada posisi yang sangat penting bagi sistem keamanan Amerika Serikat. Dikatakan juga oleh Hillhouse⁴⁵ bahwa 70% dari total pekerjaan yang ada di CIA⁴⁶ saat ini ada dipegang oleh Blackwater Worldwide dengan total angka +/- 30 miliar USD atau 250 triliun rupiah. Lebih mengejutkan lagi fakta lainnya menunjukkan bahwa lebih dari separuh nilai kontrak tersebut adalah tanpa lelang alias penunjukan langsung. Angka-angka yang ditunjukkan di atas menunjukkan betapa kuatnya posisi perusahaan ini di dalam proses kerja internal keseharian CIA. Strategi utama dari Blackwater dalam menguasai CIA adalah dengan merekrut para senior dan pensiunan pegawai CIA yang sudah tidak diperhatikan nasibnya oleh pemerintah. Mereka merekrut tenaga-tenaga veteran ini untuk dimanfaatkan ilmu dan pengetahuannya tentang intelejen.

⁴⁵ R. J. Hillhouse. "Exclusive Interview: Blackwater USA's President Gary Jackson", *The Spy Who Billed Me*, April 26, 2007. Retrieved on 2007-09-28 dalam http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,3798313,00.html (diakses pada 25 April 2009)

⁴⁶ CIA adalah singkatan dari Central Intelligence Agency. CIA merupakan dinas intelejen negara Amerika Serikat yang berfungsi melakukan kegiatan spionase di dalam dan luar negeri, untuk kepentingan negara. www.globalsecurity.org (diakses pada 20 April 2009).

Hasilnya, saat ini modul pelatihan intelejensi yang dimiliki oleh CIA juga merupakan produk dari Litbang dari Blackwater. Para agen atau pegawai di CIA untuk mendapatkan promosi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu, dan Blackwater adalah lembaga yang menangani pelatihan tersebut. Tak heran bila pada akhirnya tidak hanya penguasaan secara fisik saja, melainkan perusahaan ini juga telah menguasai CIA itu sendiri.

BAB III
KETERLIBATAN HALLIBURTON DAN BLACKWATER SECURITY
CONSULTING DI IRAK PASCA INVASI
AMERIKA SERIKAT

Persoalan Irak semakin rumit pasca runtuhnya Saddam Hussain. Mekipun secara militer Amerika Serikat unggul dan telah merebut Baghdad, tapi tidak mudah untuk mengatakan Amerika Serikat dan sekutunya telah keluar sebagai pemenang. Palsanya, stabilitas politik, keamanan, dan sosial ekonomi Irak pasca kejatuhan Saddam justru semakin memprihatinkan. Perlawanan sporadis yang terjadi di Irak setelah jatuhnya Saddam justru lebih banyak membawa korban pada pihak tentara sekutu dibandingkan dengan pertempuran itu sendiri berlangsung. Bab ini akan memaparkan mengenai serangan Amerika Serikat ke Irak yang dilanjutkan pada

kondisi Irak pasca invasi Amerika Serikat ke Irak, serta keberadaan PMC seperti Halliburton dan BSC di Irak.

3.1 Invasi Amerika Serikat ke Irak

Serangan teroris ke gedung *World Trade Center* di New York dan markas pertahanan militer Pentagon pada 11 September 2001 benar-benar membuat Amerika Serikat terguncang. Secara politik, untuk beberapa waktu Amerika Serikat bingung untuk bersikap bagaimana kepada Afganistan yang dituduh sebagai tempat persembunyian Osama bin Laden, orang yang diduga menjadi otak dari peristiwa *Black Tuesday* itu. Peristiwa ini pulalah yang telah merubah sikap dan cara pandang Pemerintah Amerika Serikat terutama Presiden Bush tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pasca serangan itu, Presiden Bush menyatakan perang terhadap terorisme dan membagi dunia sebagai kelompok yang mendukung kebijakan Amerika Serikat dan negara/kelompok yang mendukung teroris. Bush menanggapi serangan itu dengan menyatakan perang melawan terorisme dan menerapkan agenda kebijakan luar negeri radikal. Ketika berpidato di Kongres tanggal 20 September 2001, Bush dengan jelas memaparkan agenda radikal tersebut. Ia membeberkan secara garis besar visi kepemimpinan kuat Amerika Serikat yang akan memproyeksikan kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat. Rencana kebijakan luar negeri Bush semakin jelas terbaca melalui serangkaian pidato tanggal 29 Januari 2002 di hadapan anggota Kongres, tanggal 17 April 2002 di depan mahasiswa Institut Militer Virginia, dan di tengah-tengah para Kadet lulusan Akademi Militer Ameika Serikat di West Point tanggal 1 Juni 2002.⁴⁷

Berbagai pernyataan Bush dalam pidato itu kemudian menuju titik akir pada perumusan *National Security Strategy* yang ditandatangani Bush pada tanggal 17 September 2002. Strategi yang juga dikenal dengan Doktrin Bush itu menunjukkan

⁴⁷ Trias Kuncoro, *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*, (Jakarta : Kompas, 2005), hal. 102-104

dengan jelas ambisi Amerika Serikat untuk menghancurkan semua teroris di seluruh dunia. Bush berpendapat bahwa dunia akan menikmati keuntungan dengan mengadopsi nilai-nilai Amerika Serikat karena model Amerika Serikat telah menunjukkan superioritasnya. Doktrin Bush menampilkan reformulasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara komprehensif. Di dalamnya disebutkan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan supremasi militernya diragukan dan ditantang seperti masa Perang Dingin. *National Security Strategy* juga menegaskan manakala kepentingan vital Amerika Serikat dipertaruhkan, Amerika Serikat akan bergerak sendiri bila perlu.

Condoleeza Rice menyebut doktrin itu merupakan tekad Amerika Serikat juga bertekad menjadi negara pembebas yang mendedikasikan diri pada perkembangan demokrasi dan pembebasan dunia muslim. Mereka mengatakan jika Dewan Keamanan PBB tidak bisa melakukan tindakan tegas dan juga tidak bisa menerbitkan resolusi yang mengandung tindakan efektif, maka Amerika Serikat yang akan menyelesaikan permasalahan ini.⁴⁸ Pernyataan Amerika Serikat tersebut sekaligus semakin mempertegas posisi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya.

Irak adalah salah satu negara yang mendukung aktivitas terorisme, dukungan terhadap aktivitas terorisme ini menyebabkan Amerika Serikat ingin menginvasi Irak yang diawali dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal yang dapat membahayakan umat manusia di dunia. Presiden G.W. Bush menuduh Saddam Husain menyimpan senjata pemusnah massal dan Bush memaksa Irak untuk membuka wilayah negaranya untuk PBB memeriksa keberadaan senjata pemusnah massal tersebut. Walaupun sebenarnya Pemerintah Bush sudah tau bahwa tidak ada senjata pemusnah massal di Irak karena tim inspeksi senjata pemusnah massal Irak yang dibentuk Amerika Serikat resmi menyimpulkan Saddam Hussein sudah menghancurkan senjata kimia dan biologis sejak 1991. Padahal pemerintahan George Bush menjatuhkan Saddam Hussein dengan alasan kepemilikan senjata pemusnah

⁴⁸ “Kongres Setuju, Selangkah Lagi Aksi Militer AS ke Irak”, Jawa Pos edisi 24 September 2002

massal. Tim inspeksi senjata kiriman Washington ini menyatakan senjata kimia dan biologis Irak dihancurkan setelah Perang Teluk 1991. Pabrik rahasia senjata biologis Irak terakhir, sudah dihancurkan pada 1996. Saddam Hussein mengakhiri program nuklir pada 1991 setelah Perang Teluk, akan tetapi Saddam ingin menciptakan kembali kemampuan itu yang pada dasarnya sudah hancur pada 1991 setelah sanksi dilepas dan ekonomi Irak stabil.⁴⁹ Pada akhirnya tidak pernah ditemukan satupun senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan Bush pada Saddam.

Rezim Saddam Hussain memang telah lama menjadi incaran Amerika Serikat karena mereka menganggap keberadaan Saddam sebagai ancaman bagi kedaulatan Amerika Serikat, sejak pemerintahan George H.W. Bush kemudian Bill Klinton, Saddam telah menjadi incaran Amerika Serikat dan pada masa pemerintahan Clinton kelompok neokonservatif⁵⁰ di Amerika Serikat mengusulkan untuk melakukan penggulingan kekuasaan Saddam Hussain dari kursi pemerintahannya. Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap Irak, di antaranya :

1. Aspek Politik

Amerika Serikat menginginkan kondisi keamanan yang dapat menopang kepentingan-kepentingan di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat memandang Irak sebagai ganjalan utama di kawasan tersebut sehingga perlu disingkirkan. Kemudian Amerika Serikat berusaha menggantikan rejim yang terus menentanginya yaitu di bawah kekuasaan Saddam dengan rejim yang kooperatif dengan kepentingan Amerika Serikat tentunya.

2. Aspek Ekonomi

⁴⁹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2004/10/08/brk,20041008-01,id.html> (diakses pada 24 Desember 2008)

⁵⁰ Kelompok neokonservatif (*neoconservatism*) mengawali gerakannya pada pertengahan 1960-an, Liberisme yang diusung oleh Presiden Lyndon B. Johnson pada pertengahan tahun 1960-an dipandang telah gagal merespon realitas sosial politik ketika itu sehingga membuat kalangan Liberal kecewa dan memilih untuk berpindah jalur ke konservatif. Kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai kelompok konservatif baru. Dalam Eka Rudi. 2008, *Pengaruh Kelompok Neokonservatif Terhadap Kebijakan Luar Negeri AS untuk Menginvasi Irak pada Periode Pertama Pemerintahan G. W. Bush*. Jember : HI FISIP UNEJ.

Amerika Serikat memandang Irak sebagai ancaman kepentingan ekonomi terutama masalah minyak. Amerika Serikat berharap dengan membantu menjatuhkan Saddam, Amerika Serikat bisa mendikte Pemerintahan baru Irak mengenai kebijakan tentang minyak. Hal ini berhubungan dengan kemampuan Amerika Serikat mengendalikan ekonomi global.

Kondisi ini didasarkan pada kebutuhan dasar negara-negara industri maju terhadap minyak, dengan kata lain jika minyak dapat dikuasai, maka perekonomian dunia juga dapat dikendalikan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat akan melakukan apa saja untuk melindungi kepentingan ekonomi terutama melindungi tetap terjaganya suplai minyak, negara ini bahkan bisa menyerang negara lain jika keberadaan negara tersebut mengancam kepentingan minyak yang terlibat di negara produsen minyaknya.

Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Center for Global Energy Studies (CGES)* London, Irak diperkirakan memiliki 112 miliar barrel cadangan minyak. Berdasarkan data tersebut, Irak merupakan pemilik 11 % cadangan minyak dunia. Selain itu, menurut US Energy Information Administration, Irak memiliki 73 ladang minyak mentah dan hanya 15 ladang yang telah dikembangkan.⁵¹

Amerika Serikat ingin menciptakan tatanan dunia baru yang lebih aman dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik. Hal ini merupakan strategi geopolitik Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah. Bagi Amerika Serikat, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutu terdekatnya, Israel di kawasan ini. Proyek Rekonstruksi pasca perang yang akan menguntungkan Amerika Serikat.⁵² Kehancuran infrastruktur akibat

⁵¹ Mohammad Safari dan Almuzamil Yusuf, *Perang Irak-AS : Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*, Jakarta: Center of Middle East Studies, 2003.

⁵² *Ibid*

perang akan melahirkan proyek-proyek rekonstruksi dengan dana yang besar. Sebagai pelaku invasi, Amerika Serikat akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk memperoleh keuntungan besar pasca invasi.

Selain kedua faktor di atas, gaya kepemimpinan Saddam⁵³ yang menyebabkan Amerika Serikat memasuki wilayah kedaulatan Irak adalah:

1. Cara Saddam Hussain memperoleh otoritas dan legitimasi di Irak yang dalam teori politik tergolong cara ilegal, karena sering menggunakan kekerasan. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat merasa berhak untuk mencampuri dan mengakhiri rezim Saddam Hussain.
2. Politik luar negeri Saddam Hussain yang sangat dipengaruhi oleh ideologi Partai Baath, yaitu Pan-Arabisme, kemerdekaan (Arab/Irak), dan sosialisme membuat negara-negara tetangganya seperti Iran, Suriah, dan negara-negara Teluk lainnya seperti Saudi Arabia, serta Israel, dan amerika serikat merasa terancam dan khawatir. Politik luar negeri yang dimaksud adalah Perang Irak-Iran pada September 1980, invasi Irak atas Kuwait pada 2 Agustus 1990, serta sikap tegas Saddam Hussain mengenai pendudukan Israel atas Palestina. Politik luar negeri Irak ini dinilai sangat agresif sehingga dapat mengganggu kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya dalam hal menjaga kelancaran eksplorasi dan impor minyak dan menjaga eksistensi Israel.
3. Irak dianggap sebagai negara yang memiliki senjata pemusnah massal, baik itu senjata kimia seperti *mostar* yang dapat menyebabkan kulit melepuh, *tabun* dan *sarin* yang dapat menyerang syaraf, senjata biologi seperti *botulinum* yang dapat meracuni dan mencekik orang, serta *bacillus anthrax* yang dapat menyebabkan penyakit Anthrax, serta senjata nuklir, juga rudal Scud yang mempunyai jangkauan 900 kilometer untuk meluncurkan senjata-senjata tersebut. Kepemilikan senjata tersebut dapat membahayakan rakyatnya sendiri maupun negara-negara

⁵³ Siti Muti'ah Setawati, dkk., *Irak di Bawah kekuasaan Amerika: Saddam Hussain dan Masalah Kepemimpinan Irak*, PPMTT HI FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2004. hal. 167

tetangganya. Hal ini yang selalu dikampanyekan Amerika Serikat dan sekutunya Inggris.

Dengan permasalahan Irak tersebut, semula Amerika Serikat merasa perlu untuk menyelesaikan masalah Irak secara menyeluruh melalui sanksi-sanksi yang diimplementasikan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila Irak tidak bersedia menaati resolusi-resolusi PBB yang dalam resolusi terakhir kemudian membentuk tim inspeksi PBB untuk Irak yang bernama UNMOVIC (*United National for Monitoring, Verification, and Inspection Commission*) yang dipimpin oleh Hans Blix. Sekali lagi sebagai satu-satunya kekuatan yang tidak tertandingi, Amerika Serikat merasa mempunyai otoritas untuk menyerang Irak, baik secara sendiri (unilateral) maupun secara bersama-sama (multilateral), baik didukung oleh masyarakat internasional maupun tidak. Kepentingan Amerika Serikat untuk menggulingkan Saddam Hussain diwujudkan dengan menggunakan PBB untuk melegitimasi tindakannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang ditunjukkan di atas, selanjutnya Amerika Serikat membangun opini internasional bahwa Irak merupakan negara yang membahayakan sehingga pantas diserang. Akhirnya invasi Amerika ke Irak dengan kode "Operasi Pembebasan Irak" secara resmi di mulai pada tanggal 20 Maret 2003. Tujuan resmi yang ditetapkan Amerika Serikat adalah untuk "melucuti senjata pemusnah masal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak". Amerika Serikat menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini, dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri dari lebih Amerika Serikat, Britania Raya, Polandia, Australia, Korea Selatan, Rumania, Spanyol, Portugal, Italia, Jepang. Invasi Amerika Serikat ke Irak 2003 inilah yang menjadi pembuka Perang Irak.

Tabel III.1
Invasi Amerika Serikat ke Irak

Tanggal	20 Maret 2003 – 1 Mei 2003
Lokasi	Irak

Hasil	Saddam Hussein dan Partai Baath terguling; Okupasi Irak; Munculnya pemberontak Iraq, and kekerasan antar kelompok, pemilihan pemerintahan baru. Korban sipil yang luar biasa, dan munculnya regu-regu pembunuh yang brutal.
Pihak yang terlibat	Penyerang :  Amerika Serikat  Britania Raya  Polandia  Australia  Korea Selatan  Rumania  Spanyol  Portugal  Italia Diserang  Irak
Komandan	Penyerang  George W. Bush  Tommy Franks  Tony Blair Diserang  Saddam Hussain
Kekuatan	Penyerang 263.000 Diserang 375.000

Sumber: <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2004/10/08/brk,20041008-01,id.html> (diakses pada 24 Desember 2008)

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dilihat secara ringkas latar belakang dan tujuan invasi Amerika Serikat ke Irak. Setelah agresi Amerika Serikat ke Irak tidak ada kemajuan yang berarti, bahkan saat ini terjadi perang saudara. Pasca invasi Amerika Serikat menyebar 143.000 pasukannya di Irak dan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Irak, pasukan Amerika Serikat akan meninggalkan Irak pada 2011.⁵⁴ Sementara ini masih terdapat sekitar 150.000 tentara Amerika Serikat, namun hingga akhir tahun 2011 semuanya akan meninggalkan Irak. Sedangkan tanggung jawab keamanan secara bertahap akan dialihkan kepada militer dan polisi Irak.⁵⁵

⁵⁴ <http://international.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/16/18/173957/operasi-militer-as-ke-afghanistan-irak-habiskan-rp10-034-triliun/operasi-militer-as-ke-afghanistan-irak-habiskan-rp10-034-triliun>. (diakses pada 24 Desember 2008)

⁵⁵ *Irak Setuju Penempatan Pasukan AS hingga 2011*, dalam http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,3798313,00.html (diakses pada 25 April 2009)

Tujuan Amerika Serikat melakukan tindakan di atas karena Amerika Serikat bermaksud menguasai dunia melalui Timur Tengah yang diawali dari Irak. Tujuan ini dapat diwujudkan karena Amerika Serikat merupakan satu-satunya super power dunia saat ini yang tidak tertandingi sehingga menjadikan Amerika Serikat satu-satunya hegemon di Timur Tengah.

3.2 Irak Pasca Invasi Amerika Serikat

Pada subbab ini penulis akan menjelaskan kondisi Irak pasca invasi Amerika Serikat ke Irak. Seperti yang telah dijelaskan pada dua subbab sebelumnya invasi Amerika Serikat ke Irak telah menempatkan Irak pada posisi yang sangat terpuruk baik dari segi sosial, politik dan ekonomi.

Kekalahan Irak dalam Perang Teluk tahun 1991 ternyata mempunyai implikasi yang sangat buruk terhadap rakyat Irak. Pemberlakuan embargo ekonomi oleh PBB telah membuat standar hidup rakyat Irak jatuh pada tingkat yang sangat rendah. Pemberlakuan kebijakan yang mengizinkan Irak untuk menjual minyaknya guna kepentingan pangan dan obat-obatan dalam kenyataannya juga tidak mampu banyak membantu rakyat Irak keluar dari kesulitan ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh invasi Amerika Serikat dan Inggris di wilayah ini dalam rangka menggulingkan Saddam dari tampuk pemerintahan. Berbagai infrastruktur mengalami kerusakan, dan banyak diantara infrastruktur tersebut rusak berat akibat serangan yang dilancarkan oleh pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Berton-ton bom yang dijatuhkan di wilayah-wilayah Irak melalui pesawat-pesawat canggih Amerika Serikat telah meluluhlantakkan gedung-gedung sekolah, menghancurkan bangunan ibadah, rumah sakit, dan kantor-kantor pemerintahan serta instalasi umum lainnya. Masyarakat berada dalam kondisi kekurangan air, bahan makanan, dan obat-obatan, serta penerangan (listrik). Dalam beberapa waktu pasca invasi Amerika

Serikat, masyarakat Irak akan berada dalam kesulitan hidup yang cukup tajam. Dan untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi ini dibutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa besar hingga rakyat Irak dapat menikmati kembali kehidupannya seperti di masa sebelum Perang Teluk.

Jika batas sejarah modern adalah sejak Perang Dunia ke II, maka invasi ke Irak telah mengakibatkan tragedi terbesar zaman modern. Nyawa manusia dan uang yang telah dikeluarkan untuk perang habis secara cuma-cuma. Hasilnya nihil, kecuali versi Gedung Putih yang menyatakan bahwa Irak jadi negara bebas dan menuju demokrasi. Irak dibombardir terus menerus oleh Amerika Serikat tanpa ada perlawanan dari Irak. Hal ini tidak menunjukkan keadaan seperti yang sering disampaikan Amerika Serikat, yakni *Iraq War*. Dengan kata lain, *Iraq War* bukan satu kategori dengan Perang Korea atau Perang Vietnam. Terlepas dari itu, menurut laporan *Amnesty Internasional (AI)*, 17 Maret 2008, menyatakan bahwa dua dari tiga warga Irak tidak memiliki akses air bersih, empat dari sepuluh warga Irak hidup di bawah garis kemiskinan. Sistem kesehatan dan pendidikan di Irak, bersama sistem negara, secara keseluruhan telah hancur.⁵⁶

Irak kini telah porak poranda sesudah Amerika Serikat untuk kedua kalinya dalam sejarah dunia menggempur negeri tersebut habis-habisan. Invasi Amerika Serikat berlangsung lebih lama dari yang direncanakan oleh Amerika Serikat yang berjanji akan menaklukkan dan menangkap Saddam Husein dalam 5 hari. Lebih dari 20 hari Amerika Serikat mengerahkan tentaranya dengan dibantu oleh tentara Inggris dan Australia membumihanguskan negeri Irak. Amerika Serikat akhirnya dapat menaklukkan Baghdad dan Tikrit (sebagai kota asal Saddam Hussein yang mayoritas penduduknya pro-Saddam) dan membombardir seluruh bunker-bunker yang diduga merupakan kediaman Saddam Hussein. Nasib Irak paska invasi Amerika Serikat asih belum jelas, ketidakpastian kondisi politik, ekonomi, dan kehidupan sosial warga Irak merupakan dampak tersendiri setelah berlangsungnya invasi.

⁵⁶ www.icasualties.org site. (diakses pada 11 Januari 2009)

Persoalan Irak semakin rumit pasca runtuhnya Saddam Hussain. Meski secara militer Amerika Serikat unggul dan telah menguasai Irak, tapi tidak mudah untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya telah keluar sebagai pemenang. Pasalnya stabilitas politik, keamanan dan ekonomi Irak pasca jatuhnya Saddam justru semakin memprihatinkan. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Amerika Serikat menambah kekuatan militernya di Irak.

Tabel III.2
KORBAN INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK

Korban	Jumlah
Warga sipil Irak	32.600-35.700 (<i>Iraq Body Count</i>)
Polisi Irak tewas	1.900 polisi
Tentara Amerika Serikat tewas	2.300 tentara 4.284 tentara (<i>Associated Press</i>)
Tentara sekutu	205 (termasuk 103 tentara Inggris)
Tentara AS di Irak	138.000
Tentara Inggris di Irak	7.800
Kekuatan Pasukan Irak	235.000 (Dephan Inggris)
Produksi Minyak	2M barel/hari (paska invasi) 2,5M/hari (pra invasi)
Biaya perang bagi warga AS	USD 248 M (<i>National Prioritis Project</i>)

Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/03/060320_bushiraq.html (diakses tanggal 26 Desember 2008)

Dari tabel 3.2 di atas dapat kita lihat korban invasi Amerika Serikat ke Irak, baik dari pihak Amerika Serikat, sekutu dan Irak. Ironisnya korban invasi tersebut tidak hanya dari pihak militer yang ikut dalam pertempuran tersebut, melainkan banyak korban dari pihak sipil Irak. Palang Merah Internasional menyimpulkan ada lebih dari 350 ribu jiwa di Irak yang dikubur tanpa diketahui identitasnya, dan otomatis tidak diketahui oleh keluarganya. Menurut Komite Palang Merah Internasional, ribuan orang Irak yang terbunuh sejak kedatangan pasukan Amerika Serikat tahun 2003 telah dimakamkan secara massal, tanpa diketahui identitasnya dan juga tidak diketahui keluarga, di mana jasad mereka hingga kini. Menurut sumber yang sama, jumlah orang yang hilang itu bisa jadi sedang ditahan, disembunyikan,

atau sudah meninggal dan dimakamkan secara massal, atau mungkin juga hingga kini dirawat di rumah-rumah sakit dalam kondisi parah, atau hidup di tempat yang terisolir dan tersembunyi dari keramaian. Ketua komite Palang Merah Internasional di Jenewa, Pierre Kraehenbuehl menjelaskan, tidak ada penghitungan detail tentang berbagai peristiwa hilangnya orang-orang itu sejak dimulainya perang, saat Amerika Serikat datang ke Irak pada 2003. Meskipun kematian itu terjadi setiap hari dan meskipun banyak pihak yang menemukan puluhan jenazah yang tak dikenal identitasnya.⁵⁷

Tidak hanya pihak sipil yang menjadi korban invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Berdasarkan penjelasan pada table di atas, korban dari tentara regular Amerika Serikat berjumlah lebih dari 4.000 personil. Untuk mengurangi jumlah korban dari tentara regular, maka pemerintah Amerika Serikat menyewa tentara bayaran untuk membantu tugas tentara regular untuk menjaga stabilitas keamanan di Irak pasca invasi. Selain itu, tugas tentara bayaran di Irak adalah menjaga aset Amerika Serikat di Irak yang berupa ladang dan kilang minyak yang telah dikuasai oleh Amerika Serikat pasca invasi.

3.2.1 Kondisi Sosial Irak Pasca Invasi

Upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk segera membentuk pemerintahan Irak yang baru ternyata semakin membawa masalah baru. Ketidaksiapan di Irak memunculkan gangguan keamanan yang sampai saat ini masih marak terjadi. Ketidaksiapan ini terjadi karena kondisi dalam negeri Irak sendiri masih kacau ditengah perdebatan antara kaum Syiah yang mayoritas di Irak dengan kaum Sunni yang minoritas namun berkuasa selama rejim Saddam, serta upaya kurdi untuk menuntut otonomi khusus ini semakin menggambarkan betapa rumitnya menciptakan integritas sosial dan politik di Irak paska Saddam Hussein.

⁵⁷ <http://www.erasmuslim.com/berita/dunia/palang-merah-internasional-350-ribu-orang-irak-hilang-pasca-invasi-as.htm> (diakses pada 26 Desember 2008)

Dari segi kehidupan keagamaan, Irak yang mayoritas penduduknya sebanyak 60% adalah kelompok Muslim Syi'ah dan sisanya kelompok Muslim Sunni, Kurdi, komunis.⁵⁸ Masalah ini menjadi tema sentral tersendiri dalam kajian kondisi sosial warga Irak. Dengan adanya kelompok Syi'ah yang umumnya kontra terhadap Saddam dan kelompok Sunni yang umumnya pro terhadap Saddam akan menjadi satu bibit pemicu kekacauan pasca tergulingnya Saddam. Hal itu menyulut konflik horisontal yang masih belum dapat diselesaikan sampai saat ini antara para kelompok Syi'ah dengan kelompok Sunni. Keberadaan kelompok keagamaan ini masih sangat tinggi di Irak dan keberadaannya berpotensi besar adanya konflik horizontal dan perang saudara antara rakyat Irak sendiri.

Membangun Irak yang sudah hancur tentu tidak semudah seperti ketika menghancurkannya. Irak pasca invasi tidak hanya rusak infrastrukturnya tetapi juga stabilitas keamanan, ekonomi dan politiknya. Amerika Serikat ingin mendirikan negara yang demokrasi di Irak. Amerika melakukan banyak tindakan untuk memulihkan kembali stabilitas di dalam negeri Irak pasca invasi. Sebagai langkah awal Amerika Serikat memulai rekonstruksi Irak dengan memulihkan stabilitas keamanan. Dengan kondisi keamanan yang stabil, tentu sektor lain seperti ekonomi dan politik di Irak akan pulih kembali.

Seperti yang telah diketahui bahwa keamanan dalam negeri Irak setelah runtuhnya kekuasaan Saddam pada tanggal 9 April 2003 hingga saat ini tergolong sangat rawan. Gerakan perlawanan Irak masih menyulitkan pasukan Amerika Serikat, ledakan bom terjadi di mana-mana, bahkan markas PBB di Bagdad pun menjadi sasaran. Korban tewas di antara entera koalisi lebih banyak dibandingkan ketika invasi terjadi. Untuk menghindari korban yang lebih banyak dibandingkan dengan ketika invasi berlangsung. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, pasukan Amerika Serikat melakukan beberapa operasi militer untuk menekan gerakan gerilyawan di Irak. Salah satunya adalah operasi militer besar-besaran pada awal Juni

⁵⁸ Siti Muti'ah Setawati, dkk., *Irak di Bawah kekuasaan Amerika: Problem Integrasi Nasional Irak*, PPMTT HI FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2004. hal. 128

2003 yang diberi nama “operasi Al Jazeera” di kawasan Muslim Sunni di Kota Bagdad, Fallujah, Ramadi dan Sammara.⁵⁹

Selain menghadapi gerilyawan secara langsung melalui operasi militer, Amerika Serikat melalui kekuasaan sipilnya di Irak, Paul Bremer selaku Kepala Pemerintahan Sipil di Irak, juga memutuskan untuk membentuk pasukan para militer pimpinan Irak yang akan membantu mengejar pemberontak. Paul Bremer yang pada awalnya keberatan dalam hal ini, akhirnya memperlunak sikapnya setelah melihat tentara Amerika Serikat yang dijadikan sasaran oleh gerakan perlawanan Irak, jumlah korbannya semakin meningkat. Pasukan militer Irak ini akan terdiri dari satu unit kelompok intelejen dalam negeri dan untuk memperluas kekuasaan hingga melakukan serangan dan interograsi terhadap tersangka.

3.2.2 Kondisi Politik Irak Pasca Invasi

Hal lain yang masih sangat kacau pasca jatuhnya Saddam Hussain adalah pemerintahan transisi di Irak. Awalnya Irak yang dikuasai Saddam dan Partai Baath menuju penguasaan koalisi militer Amerika Serikat dan Inggris dengan tujuan menjadikan Irak menjadi sebuah negara yang demokratis. Dikatakan kacau karena banyak pihak yang berebut kekuasaan di Irak antara kaum Sunni yang lama ikut menikmati kekuasaan bersama rezim Saddam, kelompok Syi’ah yang menanggapi positif atas tumbangnya Saddam dan campur tangan asing yang menduduki Irak. Asing di sini adalah koalisi Amerika Serikat dan Inggris.⁶⁰

Pembentukan pemerintahan sementara Irak pasca invasi dilakukan dengan pembentukan “Dewan Lima” oleh Amerika Serikat yang bertugas sebagai pengurus pemerintahan sementara di Irak dan merakit komposisi pemerintahan. Dewan Lima terdiri dari Abdul Azis al-Hakim yang mewakili kaum Syiah, Massaoud Barzani dan

⁵⁹ <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/03/19/lima-tahun-invasi-ke-irak-tragedi-terbesar-sejak-pd-ii.pdf> (diakses pada 1 Desember 2008)

⁶⁰ <http://www2.kompas.com/2007/03/25/irak-pasca-perang-1/> (diakses pada 26 Desember 2008)

Jalal Talabani dari kelompok kurdi, Ahmad Chalabi ketua *Iraqi National Congress (INC)* dan Adnan Pachachi sebagai penganut muslim Sunni.⁶¹ Walaupun Dewan Lima beranggotakan orang-orang dari kelompok-kelompok yang berbeda di Irak hal ini tetap menuai banyak perdebatan karena dianggap orang-orang tersebut merupakan rancangan Amerika Serikat. Dan akhirnya setelah mengalami pergolakan yang panjang untuk pertama kalinya Irak melaksanakan pemilihan umum yang demokratis pada Januari 2005 setelah selama dua puluh tahun lebih berada dalam tangan rejim Saddam Hussein.

Pemilihan umum bulan Januari 2005 diselenggarakan untuk memilih parlemen interim yang bertugas untuk membuat rancangan undang-undang baru dan mengangkat pemerintah sementara, yang dipimpin presiden Jalal Tabalani sebagai presiden pertama yang dipilih secara demokratis. Sedangkan pada bulan Oktober 2005 diadakan pemungutan suara untuk mendukung UUD baru lewat referendum yang juga diwarnai dengan ketakutan dan ancaman perpecahan terhadap kelompok-kelompok di Irak.

Tidak ada yang dapat menduga kapan kecamuk ini kan berhenti di Irak. Pembunuhan, kontak senjata, penculikan, dan segala bentuk ungkapan kebencian serta permusuhan antara kelompok Sunni dan Syiah serta Kurdi di Irak semakin mewarnai perjalanan pembentukan Irak dalam mencari jati dirinya. Perjalanan ini seharusnya dapat menjadi lebih ringan dengan adanya konsolidasi demokrasi yang baik diantara masyarakat Irak yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, ideologi dan kepentingan didalamnya.

Sudah lebih dari 5 tahun Irak diinvasi pasukan koalisi di bawah pimpinan militer Amerika Serikat, namun proses pembangunan kembali Irak paska perang seperti dijanjikan oleh Amerika Serikat masih jauh dari harapan. Invasi tersebut justru menyebabkan kehidupan sebagian besar rakyat Irak jauh lebih buruk dibandingkan ketika di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Infrastruktur Irak yang

⁶¹ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0304/13/Fokus/250570.htm> (diakses pada 26 Desember 2008)

hancur akibat invasi Amerika Serikat hingga kini pun masih membutuhkan banyak perbaikan krusial.

3.2.3 Kerusakan Infrastruktur Irak Pasca Invasi

Pada dua subbab sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana invasi Amerika Serikat ke Irak serta bagaimana kondisi Irak pasca invasi Amerika Serikat. Pada subbab ini, penulis akan memaparkan tentang infrastruktur Irak yang rusak pasca invasi Amerika Serikat. Dengan demikian, dapat dilihat lebih jelas lagi bagaimana pengaruh invasi Amerika Serikat terhadap masyarakat dan negara Irak pasca invasi dan dilanjutkan tumbanganya Saddam Hussain.

Setelah rezim Saddam Hussain tumbang yang ditandai dengan dikuasainya ibu kota Irak, Bagdad, oleh tentara koalisi pada 8 April 2003 dan ditangkapnya Saddam Hussain pada 13 Desember 2003, maka masih ada masalah yang penting harus diselesaikan menyangkut stabilitas di internal Irak yaitu pendudukan tentara Amerika Serikat dan Inggris untuk membentuk pamerintahan yang demokrastis menuju pemerintahan yang permanen.

Berakhirnya perang Irak pada tanggal 1 Mei 2003 sekaligus membuktikan bahwa George W. Bush dan sekutunya telah gagal dalam membuktikan tuduhannya yang menjadi justifikasi bagi invasi mereka ke Irak, yaitu keberadaan senjata pemusnah massal dan keterkaitan Saddam Hussein dalam organisasi Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden yang dituduh berada dibelakang serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Namun terlepas dari kegagalan Amerika Serikat dan sekutunya, saat ini terdapat masalah yang lebih *urgent* tentang masa depan Irak kedepan. Walaupun perang telah berakhir namun situasi di Irak sendiri masih rawan gangguan keamanan dimana ledakan bom sering terjadi. Dengan ditangkapnya Saddam Hussein pada tanggal 13 Desember 2003 telah melepaskan Irak dari cengkraman rezim tirani yang selama ini berkuasa dan hal ini yang lantas menimbulkan permasalahan baru tentang

siapa *elite* yang akan berkuasa. Irak merupakan negara dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai macam etnis dan Agama antara lain Muslim Syiah, Muslim Sunni, Etnis Kurdi, Kristen, etnis Turkmen dan kelompok etnis kecil lainnya. Dengan runtuhnya rezim tirani yang selama ini dijalankan oleh Saddam telah membuat kelompok-kelompok masyarakat di Irak merasa ingin mendapatkan bagian kekuasaan yang selama ini terpusat pada partai ba'ath pimpinan Saddam Hussein.

Pembentukan Irak paska Saddam Hussein bukanlah jalan keluar yang baik bagi terciptanya Irak yang utuh, terbukti dengan masih banyak terjadinya gejolak keamanan yang disertai ledakan di Irak. Pembentukan negara Irak tidak disertai dengan adanya konsensus terhadap berbagai elemen masyarakat didalamnya bahkan hal ini diperparah dengan adanya campur tangan asing. Pembentukan Irak pasca invasi terkesan sebagai rencana Amerika Serikat semata yang ingin menancapkan dominasinya di kawasan Timur Tengah dengan mendudukan orang-orang yang pro Amerika Serikat sebagai penguasa di Irak. Amerika Serikat ingin mengambil peran yang dominan dan sentral atas Irak paska Saddam baik yang menyangkut rekonstruksi dan pemulihan Irak.

Beberapa fasilitas di Irak yang rusak dan harus direkonstruksi paska invasi Amerika Serikat adalah dalam bidang :

1. Fasilitas Publik

Dalam upaya rekonstruksi Irak paska invasi, Amerika Serikat telah memegang kendali atas proses tersebut. Banyaknya fasilitas-fasilitas publik yang rusak seperti sekolah, kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit, dan fasilitas umum lain hancur akibat invasi ini akan membawa keuntungan tersendiri bagi Amerika Serikat yang sejak awal telah terlibat langsung dalam pengempuran-pengempuran yang dilakukannya di Irak. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diharapkan memperoleh kontrak-kontrak guna menata kembali dan mengoperasikan kembali fasilitas-fasilitas vital di Irak. Sekitar 30 % rakyat Irak hidup tanpa memiliki akses kepada sumber air bersih, sementara 65 % lainnya menderita berbagai penyakit karena tidak memiliki sistem sanitasi yang bersih,

hampir 55 % jalan raya di Irak masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Rakyat Irak hanya dapat mengakses listrik kurang dari 3 jam sehari, padahal waktu di bawah Presiden Saddam Hussein dapat mengakses listrik 21 jam sehari⁶².

2. Lingkungan

Janji Amerika Serikat akan menjadikan Irak sebagai negara yang maju dan sejahtera, masih menunggu untuk mewujudkannya. Bahkan untuk infrastruktur vital seperti kebutuhan air bersih, sanitasi dan makanan masih belum tersentuh untuk diperbaiki. Sekitar 8 juta penduduk Irak saat ini terancam kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit, karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup seperti air bersih, makanan dan sanitasi, karena masih rusaknya infrastruktur Irak⁶³.

Permasalahan lingkungan Irak, segera akan menjadi persoalan yang sangat serius di Irak paska perang, termasuk pembersihan tempat-tempat berbahaya dari upaya sabotase pipa-pipa minyak. Bahan-bahan kimia kini sedang merembes ke bawah tanah dan situasi menjadi buruk dan menimbulkan permasalahan kesehatan yang serius untuk Irak. Minimnya peralatan dan kemampuan Irak untuk menangani polusi dari dua peperangan sebelumnya dan lebih dari satu dekade penerapan sanksi yang menghancurkan lingkungan, termasuk terhadap sungai Tigris dan Eufrat dimana banyak mengalir limbah yang berbahaya. Situasi menjadi buruk setelah invasi pimpinan Amerika Serikat tahun 2003, dimana munisi uranium telah dipergunakan untuk melawan Irak untuk kedua kali dan setelah perang merampas dan membakar infrastruktur menyebabkan keruntuhan dan racun. Tempat-tempat yang terkontaminasi berdekatan dengan suplai air, termasuk 200 km² (77 mil persegi) kompleks

⁶² *Ibid*

⁶³ <http://www.suara-islam.com/index.php/Internasional/Lima-Tahun-Penjajahan-AS-Rakyat-Irak-Semakin-Menderita.html> (diakses pada 26 Desember 2008)

industri militer, pabrik semen dan pupuk yang sudah dicuri dan penumpahan minyak⁶⁴.

3. Ekonomi

Rejim Saddam Hussain ditumbangkan, pemerintahan Irak kondisi sosial politik Irak carut marut dan secara langsung hal ini berpengaruh pada perekonomian Irak. Aset-aset negara dan milik warga habis dijarah habis-habisan ketika Irak dalam kondisi kacau. Ekspor utama Irak adalah minyak, akibat serangan Amerika Serikat ke Irak produksi minyak Irak berkurang sehingga menyebabkan lumpuhnya perekonomian di Irak akibat carut marutnya kondisi Irak. Upaya untuk sesegera mungkin untuk memperbaiki perekonomian Irak harus dilakukan untuk menstabilkan kembali perekonomian Irak dan dunia.

4. Industri Minyak

Keberlangsungan industri minyak di Irak adalah fokus utama yang akan diperhatikan oleh pihak-pihak asing yang berada di Irak seperti Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Amerika Serikat tetap akan menjadi pengendali dalam proses rekonstruksi perbaikan kilang-kilang minyak yang hancur akibat perang. Orang yang dipilih untuk memproduksi minyak Irak paska perang adalah mantan kepala eksekutif (CEO) Perusahaan Minyak Shell, Philip Carrol yang juga berkerja sebagai kepala eksekutif untuk Flour Corp, salah satu perusahaan Rancang Bangun raksasa yang telah diundang untuk mengajukan penawaran pada kontrak rekonstruksi utama.

Hancurnya kilang-kilang pengeboran milik Irak yang ikut hancur ketika invasi Amerika Serikat dilakukan di Irak bukan merupakan kesengajaan, karena Amerika Serikat mempunyai kepentingan besar terhadap industri minyak yang

⁶⁴ <http://www.geografiana.com/dunia/sosial/kerusakan-lingkungan-pasca-perang>. (diakses pada 26 Desember 2008)

ada di Irak. Oleh karena itu Amerika akan berusaha paling keras untuk sesegera mungkin untuk memadamkan api di kilang-kilang minyak Irak yang terbakar serta secepatnya melukan rekonstruksi terhadap kilang-kilang minyak Irak yang hancur.

Tabel III.3
Infrastruktur Irak yang akan direkonstruksi Pasca Invasi

No	Nama Perusahaan	Obyek Rekonstruksi	Besar Kontrak (\$)
1	Halliburton	<ul style="list-style-type: none"> • Memadamkan api dari kilang minyak yang terbakar • Pengeboran minyak • Pendistribusian minyak Irak 	7 miliar
2	Kellog, Brown and Root	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki dan mengoperasikan sumur minyak 	71 juta
3	Bechtel	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kembali sistem pembangkit energi dan sistem penyediaan air 	34,6 - 680 juta
4	MCI WorldCom	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun jaringan telepon di Irak 	30 juta
5	Stevedoring Services or America	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola dan memperbaiki pelabuhan-pelabuhan Irak 	4,8 juta (selama 1 tahun)
6	ABT Associates	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kesehatan 	10 juta
7	Creative Associates Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dasar 	1 – 62,6 juta
8	Blackwater Security Consulting	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawal Paul D. Bremer 	300 juta

Sumber: Nick Beams (2003), *The Political Economy of American Militarism*, dalam <http://www.wsws.org/articles/2003/nbl-j10.shtml> (diakses pada 24 Mei 2009)

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa kerusakan infrastruktur Irak pasca invasi secara keseluruhan sangat parah dan sangat jauh dari kata layak untuk

masyarakat Irak . Oleh karena itu upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat sangat dibutuhkan oleh Irak. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat pada tahun 2003 telah menandatangani kontrak untuk program pembangunan Irak pasca invasi, namun ini tetap membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu mendapatkan dukungan dari rakyat Irak. Beberapa perusahaan besar Amerika Serikat telah menandatangani kontrak miliaran dolar untuk pembangunan Irak. Proyek perusahaan-perusahaan Amerika Serikat inilah yang menjadi sorotan internasional menyangkut kuatnya motif ekonomi Amerika Serikat menyerang Irak.

Akhirnya, persoalan-persoalan ekonomi pasca invasi hingga kini menghimpit rakyat Irak akan menjadi fokus perhatian di masa-masa mendatang. Dan ini juga akan menjadi prioritas siapapun yang akan memegang kendali kekuasaan di Irak. Kemungkinan terburuk bisa saja terjadi, yaitu meluasnya kekerasan di wilayah Irak akibat kurangnya makan, tidak layak nya tempat tinggal, dan rendahnya kualitas kesehatan. Patologi sosial dalam bentuk anarkisme akan terjadi di mana-mana. Dan ini pada akhirnya akan mendorong rejim yang berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan represif, termasuk Amerika Serikat. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pasca invasi tersebut terjadi akibat kelangkaan pasokan air, listrik, dan bahan makanan.

3.3 Keberadaan Halliburton dan Blackwater Security Consulting di Irak

Bagi Amerika Serikat, perang adalah sebuah hajatan besar yang mendatangkan keuntungan berlipat ganda, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Pada invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, berbagai alasan mereka kemukakan untuk menutupi motif utama, yaitu menguasai minyak Irak. Namun, Amerika Serikat tetap tidak bisa mengelabui bahwa bagi mereka, invasi tersebut adalah sebuah proyek bisnis yang melibatkan investor, kontraktor dan regulator.

3.3.1 Masuknya Halliburton dan Blackwater Security Consulting ke Irak

Untuk menjealaskan masuknya Halliburton dan Blackwater Security Consulting ke Irak, penulis akan memaparkan awal mula kedua PMC tersebut masuk ke Irak. Setelah invasi berhasil dilaksanakan, dengan nama proyek rekonstruksi pasca invasi. Amerika Serikat menjalankan bisnis tentara bayaran di Irak. Para tentara bayaran itu dipekerjakan untuk aset-aset penting Amerika Serikat di Irak, yaitu infrastruktur yang berupa minyak yang berhasil dikuasai Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyewa jasa tentara bayaran dari perusahaan pengelola tentara bayaran yang disebut Private Military Company (PMC). Beberapa PMC tersebut dapat terlihat dengan keberadaan Halliburton dan Blackwater Security Consulting di Irak.

Ribuan tentara bayaran datang ke kawasan konflik seperti yang terjadi di Irak. Halliburton dan Blackwater adalah dua dari beberapa PMC di dunia yang ikut serta dalam konflik yang bergejolak di Irak. Kedua PMC tersebut ikut serta dalam proses rekonstruksi Irak pasca terjadinya invasi Amerika Serikat pada 2003. Bagi Amerika Serikat, kehadiran PMC di Irak sangat dibutuhkan untuk menyediakan bantuan logistik, personel dan kebutuhan lainnya untuk kepentingan angkatan perang. Mereka sepenuhnya adalah orang sipil, baik mantan tentara atau murni sejak awal.

Sebagian besar tentara bayaran itu berasal dari PMC-PMC asal Amerika Serikat. Hal ini berarti, tidak semua tentara bayaran berasal dari Amerika Serikat. Karena yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah tentara bayaran Amerika Serikat, maka penulis akan membahas beberapa PMC yang menjadi ujung tombak Amerika Serikat menegakkan kekuatannya di Irak.

PMC-PMC ini datang ke Irak dengan bekal surat kontrak antara mereka dengan pihak pemerintah Amerika Serikat, khususnya Departemen Pertahanan. Koneksi yang sudah tergabung dan terjalin antara para pengusaha dengan politisi yang duduk dalam pemerintahan membuat keberadaan mereka semakin aman. Ada hubungan timbale balik yang jelas antara pemerintah Amerika Serikat dengan para PMC ini di Irak. Di satu sisi, Amerika Serikat menginginkan kondisi yang stabil

dalam mengeksplorasi kekayaan minyak Irak. Sementara itu, di sisi lain PMC-PMC ini juga membutuhkan proyek demi kelangsungan bisnis mereka. Sinergi dari dua kepentingan ini terwujudkan dalam praktik bisnis tentara bayaran.

3.3.2 Halliburton

Di antara Private Military Company di dunia, Halliburton bisa jadi adalah yang termakmur dan yang paling dimanjakan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Dalam megaproyek membangun kembali Irak, Pemerintah Amerika Serikat memilih Halliburton sebagai rekanan utama dengan kontrak mencapai 8 milyar dollar Amerika Serikat. Banyak pihak mengatakan bahwa hal ini dikarenakan mantan Wapres Dick Cheney adalah mantan CEO Halliburton sebelum ia menjabat sebagai Wapres Amerika Serikat. Cheney menjabat sebagai CEO Halliburton tidak lama setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan Amerika Serikat (1989-1993). Cheney memegang Halliburton bersama dengan David Gribbin. David Gribbin adalah deputy Cheney semasa ia menjabat di Pentagon. Kedua orang ini di anggap menyerahkan megaproyek di Irak senilai 2,2 milyar dollar Amerika Serikat kepada Kellogg Brown and Root, anak perusahaan Halliburton. Kontrak-kontrak itu di nilai besar karena nilai kontrak untuk PMC pada umumnya hanya berkisar puluhan juta dollar.⁶⁵ Data lain menyebutkan, nilai kontrak Halliburton 12,5 milyar dollar dalam satu tahun. Sejumlah tugasnya adalah memadamkan sumur minyak, rekonstruksi kilang minyak, serta mendukung angkatan bersenjata Amerika Serikat yang sedang bertugas di Irak.

Data lain menyebutkan, tahun 2003 pemerintah Amerika Serikat memberikan kontrak senilai US\$ 8 milyar kepada Halliburton. Tugasnya adalah membangun kembali Irak. Selain membangun kembali ladang-ladang minyak yang porak-poranda, Halliburton juga harus melindungi ladang-ladang minyak tersebut. Tugas menjaga

⁶⁵ <http://vodpod.com/watch/76626-iraq-for-sale-google-video> (diakses pada 11 Mei 2009)

ladang-ladang minyak itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa keamanan yang tangguh seperti Halliburton.

Keberadaan Halliburton sebagai PMC mulai diperhitungkan setelah Amerika Serikat melakukan invasi pertamanya ke Irak. Pada 1992, Pentagon menandatangani kontrak dengan Halliburton untuk menyiapkan program dukungan bagi militer Amerika Serikat di luar negeri. Meski hanya dalam bentuk studi, Halliburton sudah diberi dana sembilan dollar Amerika Serikat. Kontrak dengan Halliburton kembali dilakukan pasca invasi kedua Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Dalam proyek rekonstruksi Irak, Halliburton mengirimkan 24.000 personil atau tiga-perempat dari total pekerja asing yang ada di Irak. Mereka mengerjakan apa saja, mulai dari menggali jamban, mengantar logistik, mencukur rambut, menyiapkan makan, dan melayani jasa surat menyurat untuk kepentingan tentara Amerika Serikat. Ribuan pekerja yang dikerahkan umumnya berasal dari kota-kota miskin di Amerika Serikat. Mereka rata-rata tidak peduli dengan risiko kehilangan nyawa karena sejak mendaftar sudah tergiur dengan gaji yang mencapai 100.000 dollar setahun. Akibatnya, hingga tahun 2006 dicatat sudah 61 personil Halliburton tewas terbunuh.⁶⁶

3.3.3 Blackwater Security Consulting

Selain Halliburton, masih ada Blackwater Security Consulting PMC asal Amerika Serikat yang juga ikut serta pada proyek rekonstruksi Irak. Dari segi pendapatan keduanya mendapat kepercayaan yang sangat besar dari Pemerintah Amerika Serikat. Blackwater Security Consulting adalah salah satu PMC milik Amerika Serikat yang juga ikut serta pada proses rekonstruksi Irak. Di antara PMC lain di dunia, BSC adalah yang paling modern. PMC ini menempati lahan yang luas di North Carolina. Jumlah tentara BSC yang bekerja di Irak sejumlah 15.000

⁶⁶ *Perusahaan Halliburton di Irak*, dalam <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2943455,00.html>. (diakses pada 11 Mei 2009)

personil.⁶⁷ Khusus untuk BSC, personil tentara bayaran yang dikirim ke Irak juga berbeda dengan beberapa PMC lainnya. Hal ini dikarenakan Blackwater hanya mengkhususkan diri untuk para veteran perang dan bertugas secara khusus. Misalnya melakukan pengawalan VIP, melatih pasukan anti teror Irak, serta tugas yang cenderung menghadapi aksi perlawanan bersenjata. Oleh karena itu, korban yang jatuh saat bertugas umumnya dimulai dari tenaga kerja Blackwater. Seperti pada serangan yang terjadi di Fallujah, Irak pada 31 Maret 2004 ketika tentara Blackwater menjalankan tugas mengawal pengiriman makanan bagi pengungsi. Empat anggota satuan pengamanan Blackwater disergap gerilyawan Irak yang kemudian dibunuh serta dimutilasi dan dibakar. Dua jenazah kemudian digantung di tiang jembatan di atas Sungai Euphrates. Tidak lama dari peristiwa tersebut, peristiwa balasan yang dilakukan tentara BSC tanpa sepengetahuan dan persetujuan tentara Amerika Serikat.

Di Irak, salah satu tugas tentara bayaran dari BSC adalah mengawal Paul Bremer Gubernur Jenderal Amerika Serikat di Irak. Tugas mereka mulai dari seperti satpam di Indonesia. Menjaga ladang minyak, bank, kompleks perumahan, atau perkantoran. Tapi mereka juga melayani jasa pengawalan pribadi, seperti kesatuan pasukan pengawal presiden untuk para diplomat, kontraktor sipil, hingga LSM yang beroperasi di Irak. Bahkan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tugas tentara reguler, memberi pengawalan di wilayah perang atau berisiko tinggi juga mereka layani. Selain kontrak mengirim tentara, Blackwater juga menerima kontrak Angkatan Laut Amerika Serikat senilai US\$ 35,5 juta pada 2002 untuk melatih perlindungan, pengawalan, hingga teknik penggeledahan.⁶⁸ Sebagaimana diketahui *Blackwater* merupakan perusahaan swasta terbesar yang memberikan jasa keamanan bagi diplomat Amerika Serikat yang bertugas di Baghdad. *Blackwater* dilibatkan di Irak dengan alasan untuk menciptakan keamanan dan ditugaskan melawan para

⁶⁷ wap.korantempo.com/view_details.php?idedisi=1363&idcategory=11&idkoran=10619&y=2004&m=04&d=03-8k – (diakses pada 23 Juli 2008)

⁶⁸ wap.korantempo.com/view_details.php?idedisi=1363&idcategory=11&idkoran=10619&y=2004&m=04&d=03-8k – (diakses pada 9 Januari 2009)

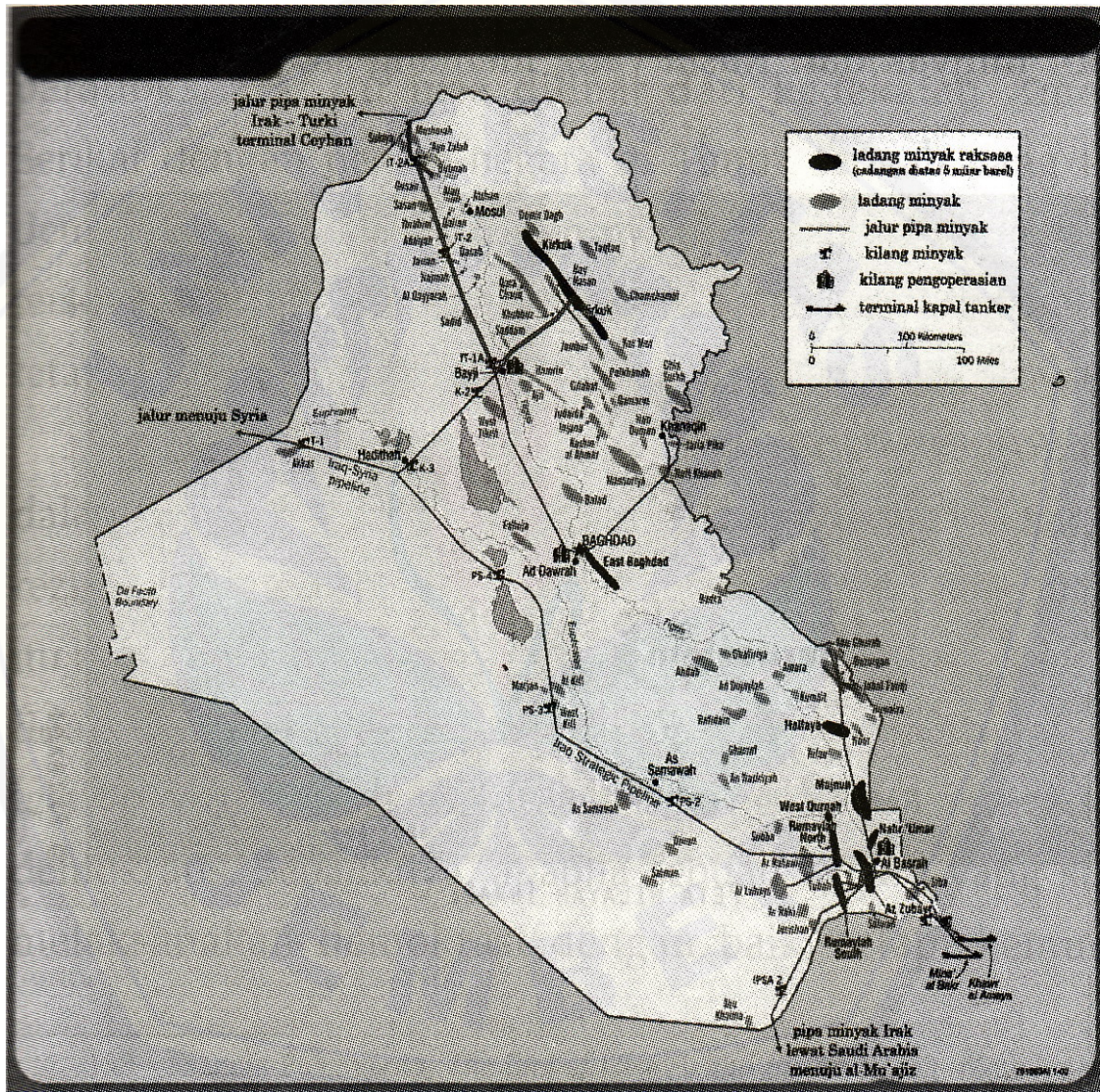
mujahidin. Di Bagdad, anggota Blackwater mudah untuk dikenali. Mereka menggunakan pakaian bertulisan Blackwater, secara fisik sosok mereka mudah dikenali karena badan mereka berotot seperti binaragawan, rambut cepak atau gundul, dan kacamata gelap model melingkar. Mereka juga selalu menggunakan earphone untuk *handy talkie*, dan selalu membawa senapan mesin ringan. Pemerintah Amerika Serikat memilih menggunakan tentara bayaran seperti Blackwater karena pertanggungjawabannya tidak serumit ketika mengirim kesatuan utuh. Untuk menyewa tentara bayaran Gedung Putih hanya perlu mempertanggungjawabkan keuangannya saja.⁶⁹

Markas Komando terbesar Amerika Serikat terbesar terdapat di Umm Qassar di sebelah selatan Irak dan juga di Baghdad. Wilayah Selatan adalah wilayah yang di dominasi golongan Syiah. Sementara itu, wilayah Utara di dominasi suku Kurdi yang tidak berbahaya. Daerah yang paling berbahaya di Irak pasca invasi adalah wilayah Segitiga Sunni Irak⁷⁰ yang menghubungkan ketiga kota besar, yaitu Baghdad, Ramadi dan Tikrit. Wilayah ini terdapat di tengah-tengah negara Irak dan merupakan jalur distribusi yang menghubungkan wilayah selatan dan utara Irak. Amerika Serikat harus melewati jalur ini setiap kali mengirim dan menjemput logistik mereka. Untuk alasan keamanan jalur pipa minyak yang berasal dari wilayah selatan dan utara Irak yang memang kaya akan minyak. Salah satu kota yang dilewati oleh pipa minyak adalah Fallujah yang sering disebut kota kematian bagi pasukan Amerika Serikat, oleh karena itu Blackwater disewa pemerintah Amerika Serikat.

Untuk memudahkan mengetahui jalur pipa minyak di Irak yang sekaligus menjadi basis penjagaan dan penempatan tentara bayaran Amerika Serikat di Irak, lokasi tugas tentara bayaran bisa dilihat dari peta di bawah ini :

⁶⁹Akhir “penjahat” berkedok tentara bayaran di Irak dalam http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8516:akhir-qpenjahatq-berkedok-tentara-bayaran-di-iraq-&catid=67:internasional&Itemid=55 (diakses pada 11 Mei 2009)

⁷⁰ Siti Muti'ah Setawati, dkk., *Irak di Bawah kekuasaan Amerika: Problem Integrasi Nasional Irak : Suku Kurdi, arab Sunni, dan Syiah*. PPMTT HI FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2004. hal. 128



PETA SUMBER KILANG MINYAK IRAK

Sumber: Sukarwo, Wirawan. *Tentara Bayaran AS di Irak*. Gagas Media, Jakarta, 2009. hal.153